

**IMPLEMENTASI PASAL 17 AYAT (1) PERATURAN GUBERNUR
LAMPUNG NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG TATA
KELOLA DAN HILIRISASI UBI KAYU PERSPEKTIF**

SIYASAH TANFIDZIYAH

**(Studi Di Dusun Srimukti Desa Sinar Rejeki
Kecamatan Jati Agung)**

ARTIKEL ILMIAH

**AGUNG ROMADON
NPM: 2221020204**



Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H/2026 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 17 AYAT (1) PERATURAN GUBERNUR
LAMPUNG NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG TATA
KELOLA DAN HILIRISASI UBI KAYU PERSPEKTIF
SIYASAH TANFIDZIYAH
(Studi Di Dusun Srimukti Desa Sinar Rejeki
Kecamatan Jati Agung)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 pada Program Studi Hukum
Tatanegara

Oleh:
Agung Romadon
NPM: 2221020204

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : DR. RELIT NUR EDI S.AG,M.KOM,I
Pembimbing II : IIP NURUL TOPANI, SH. MH

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H/ 2026 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ة	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	ẓ	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah. Pasal tersebut mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap lapak pembelian atau penerimaan ubi kayu guna menciptakan tata niaga yang tertib, adil, dan melindungi kepentingan petani.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan kepala desa, pelaku usaha lapak ubi kayu, dan petani di Desa Sinar Rejeki, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Data dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan temuan lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori Siyasah Tanfidziyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 17 Ayat (1) belum berjalan secara optimal. Pengawasan terhadap perizinan usaha, tera timbangan, kualitas ubi kayu, dan tata niaga masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan pengawasan lapangan, rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap legalitas usaha, monitoring dan tera ulang timbangan belum dilakukan secara berkala serta lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Kondisi tersebut menyebabkan masih ditemukannya lapak yang beroperasi tanpa izin, kurangnya transparansi dalam transaksi, dan potensi kerugian bagi petani.

Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan secara optimal pengawasan monitoring dan pengecekan tera timbangan masih belum dilakukan secara rutin oleh pemerintah terkait hal tersebut menyebabkan masih adanya lapak beroperasi tanpa izin serta transaksi yang tidak transparan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengawasan, Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu, Siyasah Tanfidziyah.

ABSTRACT

This study discusses the implementation of Article 17 paragraph (1) of Lampung Governor Regulation Number 36 of 2025 concerning Cassava Governance and Downstreaming from the perspective of Siyasa'h Tanfidziyah. The Governor Regulation was issued as an effort by the Lampung Provincial Government to create effective cassava governance, improve farmer welfare, maintain price stability, and encourage the downstreaming of the cassava industry in Lampung Province. The purpose of this study is directed at the implementation of regional government policies in regulating cassava trade and their compliance with the principles of governance in Islamic law, especially Siyasa'h Tanfidziyah which emphasizes the government's responsibility in realizing the welfare of society.

This study uses a qualitative research method with an empirical juridical approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation of cassava farmers, business actors, and local governments. Data were analyzed descriptively by connecting facts in the field with the provisions of Lampung Governor Regulation Number 36 of 2025 and the theory of Siyasa'h Tanfidziyah. The research results indicate that the implementation of Article 17 paragraph (1) of Lampung Governor Regulation Number 36 of 2025 has not been optimal. Several obstacles remain, such as weak government oversight, inconsistencies in reference purchase prices in the field, low transparency in the pricing system, and a less than optimal partnership between farmers and the cassava processing industry.

From a Siyasa'h Tanfidziyah perspective, local governments have an obligation to implement policies fairly, transparently, and in favor of community welfare. Therefore, strengthened oversight, improved inter-agency coordination, and consistent enforcement of regulations are needed to maximize the goals of cassava governance and downstreaming.

Keywords: *Implementation; Supervision of Cassava Stalls; Siyasa'h Tanfidziyah*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agung Romadon

NPM : 2221020204

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa artikel ilmiah yang berjudul "**Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Dan Hilirisasi Uby Kayau Perspektif Siyasa'h Tanfizdiyah**" adalah benar merupakan karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk atau disebut dalam footnote maupun daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Juni 2026

Penulis



Agung Romadon

NPM. 2221020204



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Artikel : IMPLEMENTASI PASAL 17 AYAT (1)
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG TATA
KELOLA DAN HILIRISASI UBI KAYU
PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH**

Nama : Agung Romadon

NPM : 2221020204

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Relit Nur Edi, S.Ag. M.Kom.I.

NIP. 196901051998031003

Lip Nurul Topani, SH.MH

NIP. 198709242025212063

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Dr. M. Yasir Fauzi, S. Ag. M.H.

NIP. 197102082003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Artikel Ilmiah dengan judul “IMPLEMENTASI PASAL 17 AYAT (1) PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG TATA KELOLA DAN HILIRISASI UBI KAYU PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH*” yang disusun oleh Aris Maisa NPM : 2221020025, Program Studi Hukum Tatanegara (SS), telah diujikan dalam sidang Munaqasah di fakultas syari'ah UIN Raden Intan Pada hari/tanggal: Senin, 06 Juli 2026.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. EFA RODIAH NUR, M.H


(.....)

Sekretaris : IDRUS ALGHIFFARI, SH. MH.


(.....)

Penguji I : AGUSTINA NURHAYATI, S,Ag. MH

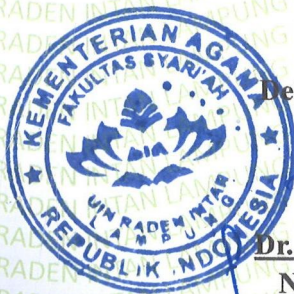

(.....)

Penguji II : Dr. RELIT NUR EDI, S Ag., M.Kom.I.


(.....)

Penguji III : IIP NURUL TOPANI, SH.MH


(.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”
(Q.S An-Nisa 4:58)



PERSEMBAHAN

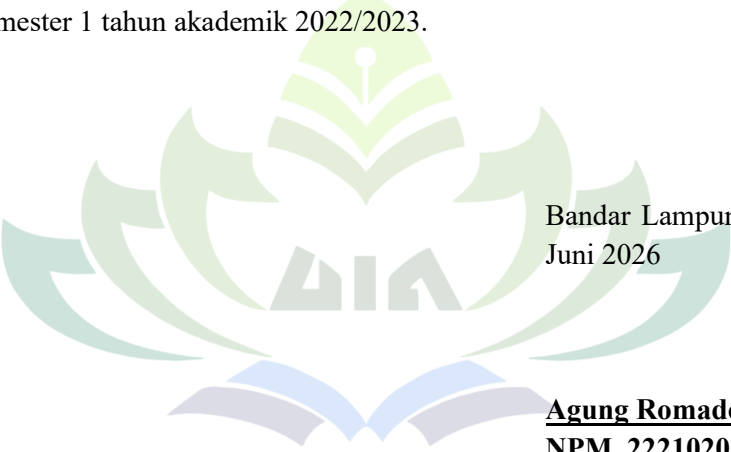
Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan, serta ketekunan bagi penulis dalam menyusun artikel ini, dengan segenap rasa cinta dan kasih, penulis persembahkan Karya Artikel Ilmiah ini kepada:

1. Kepada Ibu Dan Ayah tercinta , sosok yang menjadi pintu surga dan panutan bagi penulis. Terima kasih atas kasih sayang tulus, cinta yang tak pernah putus, serta doa dan motivasi yang terus mengiringi setiap langkah. Segala bentuk pengorbanan yang dilakukan tanpa mengeluh dan perhatian yang diberikan telah menjadi kekuatan besar bagi penulis. Segala pencapaian ini tidak akan berarti tanpa cinta dan perjuangan ibu dan ayah. Semoga karya sederhana ini menjadi bukti kecil dari rasa terima kasih dan bakti penulis kepada ibu dan ayah.
2. Adikku tersayang, terimakasih atas semangat dan keceriaan yang selalu menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis. Semoga kelak adik dapat melangkah lebih jauh, meraih mimpi lebih tinggi, serta menjadi pribadi yang lebih baik dari penulis, baik dalam ilmu, akhlak, maupun masa depan yang akan dijalani. Doa terbaik selalu menyertai setiap langkahmu.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Penulis Agung Romadon Lahir Di Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Pada Tanggal 8 Desember 2000, Anak Pertama Dari Pasangan Bapak Legiyono Dan Ibu Masnah.

Pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 purwotani dan lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Satap satu purwotani hingga lulus pada tahun 2018, serta menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 01 Jati Agung lulus pada tahun 2021, dan melanjutkan Studi Tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung di mulai pada semester 1 tahun akademik 2022/2023.



Bandar Lampung, 10
Juni 2026

Agung Romadon
NPM. 2221020204

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT., Rabb pencipta alam semesta dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam dan kesehatan baik jasmani maupun rohani kepada kita semua. Shalawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW karena ridha dan syafaatnya penulis dapat menyelesaikan artikel ini yang berjudul: “Analisis *Siyasah Tanfidziyah* Dalam Implementasi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Di Pekon Tanjung Raya Lampung Barat”. Artikel ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penulisan Artikel ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. M. Yasir Fauzi S.Ag, M.H Dan Ibu Nur Rahmah, S.H.I.,M..H selaku ketua prodi dan sekretaris syariah, hukum tata negara (*siyasah syar'iyah*).
4. Bapak Dr. Rellit Nur Edi, S. Ag, M. Kom.I Selaku Pembimbing I dalam penyusunan artikel ilmiah ini.
5. Ibu Iip Nurul Topani, S.H.M.H Selaku Pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan artikel ilmiah ini.
6. Sivitas akademik UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu dan memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
7. Kepala Perpustakaan Pusat dan Fakultas UIN Raden Intan Lampung.
8. Kepala desa sinar rejeki beserta staf-stafnya dan pihak pengelola usaha lapak uby kayu serta anggota kelompok tani

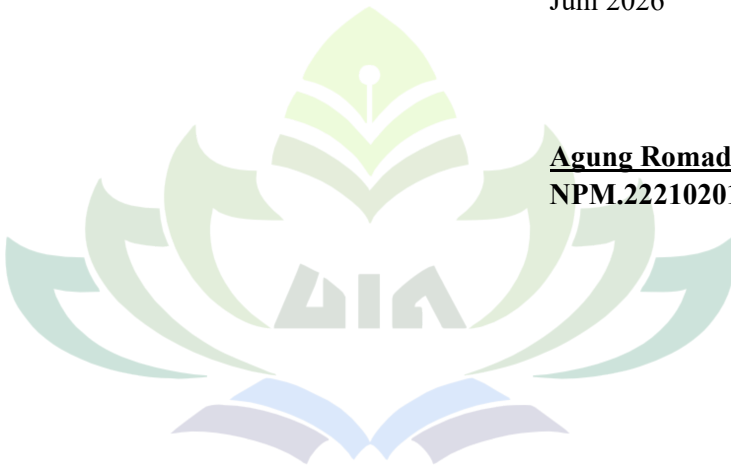
yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian, terimakasih atas waktu dan bantuannya.

Demikianlah sebuah kalimat pengantar penulis mengetahui artikel ilmiah ini telah disusun secara baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan artikel ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk memberikan dorongan agar dalam pembuatan artikel kedepannya bisa lebih baik lagi dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Wassalamualaikum wr. wb.

Bandar Lampung, 10
Juni 2026

Agung Romadon
NPM.2221020193



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN	v
PERNYATAAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
ARTIKEL ILMIAH	1
ABSTRAK	1
PENDAHULUAN	3
METODE PENELITIAN	8
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	10
KESIMPULAN	31
DAFTAR PUSTAKA.....	32
LAMPIRAN	36
Lampiran 1 Surat izin penelitian	37
Lampiran 2 Balasan Surat Izin Penelitian	37
Lampiran 3 <i>Letter of Acceptance</i> (LoA).....	39
Lampiran 4 Sitasi Dari Rumah Jurnal	40
Lampiran 5 Bukti Submit dan revisi di rumah jurnal	41
Lampiran 6 Hasil Turnitin	43
Lampiran 7 publikasi jurnal.....	49
DOKUMENTASI.....	65



ARTIKEL ILMIAH
IMPLEMENTASI PASAL 17 AYAT (1) PERATURAN GUBERNUR
LAMPUNG NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG TATA
KELOLA DAN HILIRISASI UBI KAYU PERSPEKTIF
SIYASAH TANFIDZIYAH
(Studi Di Dusun Srimukti Desa Sinar Rejeki
Kecamatan Jati Agung)

Agung Romadon¹, Relit Nur Edi², Iip Nurul Topani³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Email: agunngrmd19@gmail.com¹, relitt@radenintan.ac.id²,
iipnurultofani@radenintan.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu serta meninjaunya dalam perspektif Siyasaah Tanfidziyah. Pasal tersebut mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap lapak pembelian atau penerimaan ubi kayu guna menciptakan tata niaga yang tertib, adil, dan melindungi kepentingan petani.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan kepala desa, pelaku usaha lapak ubi kayu, dan petani di Desa Sinar Rejeki, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Data dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan temuan lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori Siyasaah Tanfidziyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Implementasi Pasal 17 Ayat (1) belum berjalan secara optimal. Pengawasan terhadap perizinan usaha, tera timbangan, kualitas ubi kayu, dan tata niaga masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan pengawasan lapangan, rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap legalitas usaha, monitoring dan tera ulang timbangan belum dilakukan secara berkala

serta lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Kondisi tersebut menyebabkan masih ditemukannya lapak yang beroperasi tanpa izin, kurangnya transparansi dalam transaksi, dan potensi kerugian bagi petani. Ditinjau dari

perspektif Siyasaah Tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan secara optimal pengawasan monitoring dan pengecekan tera timbangan masih belum di lakukan secara rutin oleh pemerintah terkait hal tersebut menyebabkan masih adanya lapak beroperasi tanpa izin serta transaksi yang tidak transparan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengawasan, Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu, Siyasaah Tanfidziyah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Article 17 Paragraph (1) of Lampung Governor Regulation Number 36 of 2025 concerning Cassava Governance and Downstreaming and review it from the perspective of Siyasaah Tanfidziyah. The article regulates the obligation of regional governments to supervise cassava purchasing or receiving stalls in order to create an orderly, fair trade system and protect the interests of farmers. This study uses a qualitative method with an empirical juridical approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation involving village heads, cassava stall business actors, and farmers in Sinar Rejeki Village, Jati Agung District, South Lampung Regency. Data were analyzed descriptively by linking field findings with statutory provisions and Siyasaah Tanfidziyah theory. The results of the study indicate that the implementation of Article 17 Paragraph (1) has not been running optimally. Oversight of business permits, weighing scales, cassava quality, and trade regulations still faces various obstacles, such as a lack of inter-agency coordination, limited field supervision, low business awareness of business legality, and weak enforcement of sanctions for violations. These conditions have resulted in the continued discovery of unlicensed stalls, a lack of transparency in transactions, and potential losses for farmers.

From a Siyasaḥ Tanfidziyah (Social and Administrative System) perspective, the implementation of this policy does not fully reflect the principles of trustworthiness, justice, maslahah (benefit), hisbah (accountability), and tanfidz al-ahkam (benefit) because supervision and enforcement of regulations have not been optimally implemented. Therefore, strengthened supervision, improved inter-agency coordination, ongoing outreach, and stricter law enforcement are needed to ensure the effective achievement of cassava governance and downstreaming goals and benefit the community.

Keywords: Policy Implementation, Supervision, Cassava Governance and Downstreaming, Siyasaḥ Tanfidziyah.

A. PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena keberhasilan suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi hukum, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Suatu kebijakan yang telah ditetapkan akan sulit mencapai tujuan apabila tidak didukung oleh sistem implementasi yang baik, pengawasan yang optimal, koordinasi antar lembaga, serta kepatuhan pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Oleh karena itu, implementasi menjadi indikator utama dalam menilai berhasil atau tidaknya suatu regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu sebagai instrumen hukum untuk mengatur sistem tata kelola komoditas ubi kayu secara terarah dan berkelanjutan. Dalam regulasi tersebut, Pasal 17 ayat (1) memiliki kedudukan penting karena berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintah dalam menjalankan pengawasan, pembinaan, serta pengendalian terhadap pelaksanaan tata kelola dan hilirisasi ubi kayu. Implementasi pasal tersebut menjadi aspek yang penting dikaji karena pelaksanaan regulasi di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi,

keterbatasan pengawasan, serta masih adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan kondisi empiris¹.

Lampung adalah produsen ubi kayu (singkong) terbesar di Indonesia, menyumbang sekitar 39% - 47% dari total produksi nasional. Menghasilkan hingga 7,9 juta ton per tahun, komoditas ini menyokong lebih dari 70% industri tapioka nasional. Menjadi peringkat satu Nasional sebagai sentra utama ubi kayu, menyuplai kebutuhan pangan hingga bahan baku Total luas perkebunan ubi kayu di Lampung mencapai kurang lebih 366.830 hektar. Tingginya permintaan terhadap ubi kayu mendorong berkembangnya usaha lapak ubi kayu sebagai sarana distribusi hasil pertanian, khususnya pada skala usaha mikro dan kecil. Meningkatnya jumlah lapak ubi kayu memerlukan pengaturan dan pengawasan yang memadai agar kegiatan usaha berjalan tertib serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan usaha tersebut adalah kepemilikan izin usaha. Perizinan tidak hanya berfungsi sebagai legalitas kegiatan usaha, tetapi juga sebagai instrumen pemerintah dalam menjaga ketertiban umum, mengatur tata ruang, melindungi lingkungan, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat².

Ketentuan mengenai tata kelola usaha ubi kayu diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu. Dalam regulasi tersebut, Pasal 17 ayat (1) memiliki kedudukan penting karena berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintah dalam menjalankan pengawasan, pembinaan, serta pengendalian terhadap pelaksanaan tata kelola dan hilirisasi ubi kayu. Hilirisasi ubi kayu adalah proses transformasi singkong dari bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi (seperti tapioka, mocaf, dan bioetanol). Tata ubi kayu mengatur alur dari hulu ke hilir untuk memastikan stabilitas harga, kualitas, dan kesejahteraan petani³.

¹ Bambang Hari Wibisono Aminah Sunardiyono Putri, "Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian The Implementation Of Sustainable Food," *Jurnal Kebijakan Publik* 13, no. 4 (2022): 323–30, <https://jkp.ejournal.unri.ac.id>.

² Khalisa Ayu, Komang Putri, dan Ainu Rahmi, "Implementasi kebijakan penguatan fungsi penyuluhan pertanian," *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 4 (2023): 453–62, <https://jkp.ejournal.unri.ac.id>.

³ peraturan gubernur lampung, "tata-kelola-dan-hilirisasi-ubi-kayu.pdf" (Bandar lampung: bandar lampung 31-10-2025, 2025).

Implementasi pasal tersebut menjadi aspek yang penting dikaji karena pelaksanaan regulasi di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi, keterbatasan pengawasan, serta masih adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan kondisi empiris. pelaku usaha lapak ubi kayu wajib melakukan pembelian atau penerimaan ubi kayu sesuai dengan ketentuan pemerintah, terutama terkait standar timbangan, legalitas usaha, kepatuhan pajak, dan kualitas ubi kayu. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki izin usaha sebagai bentuk pengakuan hukum terhadap kegiatan usaha yang dijalankan. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap tera timbangan, kepatuhan pembayaran pajak, dan kualitas hasil panen ubi kayu yang diperdagangkan. Kurangnya pengawasan terhadap usaha lapak ubi kayu dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti berdirinya usaha tanpa izin, penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan, gangguan lalu lintas, pencemaran lingkungan akibat limbah, hingga munculnya persaingan usaha yang tidak sehat antara pelaku usaha⁴. Dari total 89 pabrik tapioka di Provinsi Lampung, sebanyak 28 pabrik atau sekitar 31,46% telah terdaftar dalam SIINas, sedangkan 61 pabrik atau sekitar 68,54% belum terdaftar. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya kepatuhan administratif pelaku usaha ubi kayu dan perlunya penguatan pengawasan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengawasan perizinan perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh instansi terkait guna memastikan setiap pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang efektif diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang tertib, adil, dan berkelanjutan sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat⁵.

Penelitian terdahulu umumnya membahas implementasi kebijakan publik di sektor pertanian, perizinan usaha, dan tata kelola pertanian secara umum, namun masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian

⁴ Brian Hafiz Arrizal, Resa Piska Ramadhan, dan Akhmad Fahrurrizkianur, "Analisis Pentingnya Legalitas Usaha (Daftar Izin Usaha) Bagi Perusahaan," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 4 (2024): 298–308, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>.

⁵ Paranoan Natalia Patari, Emmy, "Tantangan dan Solusi Dalam Pengawasan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Manajemen Sumber Daya Manusia dalam," *Jurnal Ekonomi Holistik* 1, no. 2 (2025): 198–204.

(research gap). Pertama, penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji implementasi kebijakan usaha ubi kayu secara umum dan belum secara spesifik membahas pengawasan terhadap usaha lapak ubi kayu sebagai bagian dari tata niaga komoditas pertanian. Kedua, kajian mengenai implementasi kebijakan tata kelola ubi kayu masih berfokus pada aspek produksi, hilirisasi, atau kebijakan pertanian secara umum, sementara aspek pengawasan terhadap legalitas usaha, tera timbangan, pajak, dan pengendalian lapak pembelian masih relatif terbatas. Ketiga, penelitian sebelumnya belum banyak menghubungkan implementasi kebijakan daerah dengan perspektif Siyash Tanfidziyah sebagai pendekatan dalam menilai tanggung jawab pemerintah terhadap pelaksanaan regulasi. Keempat, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis implementasi Pasal 17 ayat (1) Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang tata kelola dan hilirisasi ubi kayu, terutama pada konteks pengawasan lapak pembelian/penerimaan ubi kayu di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji implementasi pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha lapak ubi kayu berdasarkan perspektif Siyash Tanfidziyah.

Menurut George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Namun, sebagian besar penelitian implementasi kebijakan pertanian hanya berfokus pada aspek pelaksanaan program dan belum mengkaji secara mendalam fungsi pengawasan terhadap pelaku usaha dalam rantai tata niaga komoditas pertanian⁶.

Penelitian Ayu Kartika Putri menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pertanian lebih banyak diarahkan pada peningkatan produksi dan pembinaan petani, sementara aspek pengawasan legalitas usaha dan perlindungan petani masih terbatas.

⁶ Dody Setyawan, Agus Priantono, Firman Firdausi. "Model George Edward Iii: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018" *Jurnal Politik, Sosial & Kebijakan Publik (Publicio)* 3, No. 2 (2023): 9–19.

Hal ini menunjukkan adanya ruang penelitian mengenai pengawasan lapak ubi kayu sebagai bagian dari tata kelola komoditas pertanian.⁷

penelitian Prasiwi membahas implementasi perizinan usaha mikro dan kecil, tetapi belum mengaitkannya dengan pengawasan tera timbangan, kualitas komoditas, dan perlindungan petani dalam sektor pertanian. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian pada aspek pengawasan usaha lapak ubi kayu secara komprehensif.⁸

Perspektif hukum Islam, penelitian Aprelia dan Nurhayati menjelaskan bahwa Siyasah Tanfidziyah menekankan tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan dan mengawasi kebijakan demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat. Namun, kajian tersebut belum diterapkan pada implementasi kebijakan tata kelola dan hilirisasi ubi kayu di Provinsi Lampung.

implementasi Menurut Grindle merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Horn mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijak. Berdasarkan kondisi tersebut, pengawasan terhadap usaha lapak ubi kayu menjadi hal yang penting untuk dikaji lebih mendalam. Penelitian ini penting dilakukan karena masih ditemukan berbagai permasalahan terkait legalitas usaha lapak ubi kayu, sementara pengawasan dari pemerintah daerah belum sepenuhnya berjalan optimal. Selain itu, penelitian mengenai pengawasan usaha lapak ubi kayu masih relatif terbatas, khususnya yang berfokus pada implementasi pengawasan pemerintah daerah terhadap usaha lapak ubi kayu⁹.

⁷ Ayu, Khalisa, Komang Putri, Dan Ainu Rahmi. "Implementasi Kebijakan Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian." *Jurnal Kebijakan Publik* 14, No. 4 (2023): 453–62. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id>.

⁸ Safira Diah Prasiwi, Lailul Mursyidah, Dan Slamet Hari Sutanto, "Volume 18 Nomor 1 Juni 2024 Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi Usaha Mikro Dan Kecil Topi Di Desa Punggul , Kabupaten Sidoarjo)," *Jurnal Utbang Kebijakan* 18, No. 666 (2024): 59–73, <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v18i1.629>.

⁹ Prasiwi, Safira Diah, Lailul Mursyidah, Dan Slamet Hari Sutanto. "Volume 18 Nomor 1 Juni 2024 Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi Usaha Mikro Dan Kecil

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai pengawasan usaha lapak ubi kayu berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu. Khususnya pada pasal 17 ayat (1). Penelitian ini tidak hanya membahas aspek legalitas usaha secara umum, tetapi juga mengkaji pelaksanaan pengawasan terhadap perizinan, tera timbangan, kepatuhan pajak, dan kualitas ubi kayu pada usaha lapak ubi kayu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pengawasan usaha pertanian serta menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola usaha ubi kayu yang tertib, legal, dan berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari lokasi penelitian mengenai pelaksanaan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu di Desa Sinar Rejeki Dusun Srimukti Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Desa Sinar Rejeki dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang relevan dengan implementasi pengawasan usaha ubi kayu di tingkat lapangan. Desa ini berada di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, yang merupakan wilayah dengan aktivitas pertanian dan kelompok tani yang aktif sehingga memiliki keterkaitan dengan tata kelola komoditas pertanian, termasuk ubi kayu. penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menelaah penerapannya dalam kehidupan masyarakat serta menganalisisnya berdasarkan perspektif siyasah tanfidziyah.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Pasal 17 Ayat (1) pengawasan terhadap lapak ubi kayu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025. Selain itu,

penelitian ini juga menganalisis implementasi kebijakan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, wawancara kepada tiga orang yaitu bapak Iwan Syamsyuri sebagai kepala desa, bapak Mukhtar sebagai pelaku usaha lapak ubi kayu, bapak Sarda sebagai petani ubi kayu, serta pihak lain yang dianggap mengetahui pelaksanaan kebijakan tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lain yang relevan dengan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur guna memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan pengawasan lapak ubi kayu. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi lapangan dan aktivitas usaha lapak ubi kayu. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, seperti arsip desa, surat izin, foto kegiatan, dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Tabel 1. Data wawancara langsung

No	Narasumber	jabatan	Peranan dalam penelitian
1.	Bapak R.H.W	kepala disperindang	Sebagai informan kunci
2.	Bapak I S	Kepala desa	Sebagai informan utama
3.	Bapak M	pelaku usaha	Sebagai informan pendukung
4.	Bapak S	petani singkong	Sebagai informan pendukung

dalam penelitian ini meliputi seluruh pihak yang berkaitan Dengan implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 di Desa Sinar Rejeki Dusun Srimukti

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian dan pihak-pihak yang dianggap memahami objek penelitian yaitu; kepala desa, pelaku usaha, dan petani.

Data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui tahap editing, klasifikasi, dan penyusunan data secara sistematis. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara mereduksi data, menyajikan data, serta menarik Kesimpulan¹⁰. Hasil analisis tersebut kemudian dikaitkan dengan temuan lapangan baik teori dan regulasi yang berlaku, baik menurut hukum normatif maupun prinsip siyasah tanfidziyah untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengawasan lapak ubi kayu¹¹.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025

Pasal 17 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 mengatur kewajiban pelaku usaha dalam tata kelola pembelian ubi kayu dari petani. Implementasi Pasal 17 ayat (1) Pergub Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap tata niaga ubi kayu, khususnya berkaitan dengan pajak, timbangan, perizinan dan kualitas ubi kayu. Keempat aspek tersebut menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem perdagangan ubi kayu yang transparan, adil, dan memberikan perlindungan terhadap petani maupun pelaku usaha. Pemerintah telah menetapkan kebijakan namun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 diterbitkan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menata tata niaga ubi kayu, meningkatkan

¹⁰ Miles dan Huberman, *Qualitative Data Analysis* (SAGE Publications, Inc. 2455 Teller Road Thousand Oaks, California 91320, 2014).

¹¹ Fildza Malahati, "Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi," *Jurnal Pendidikan Dasar* 11, no. 2 (2023): 341–48.

nilai tambah melalui hilirisasi, serta melindungi kesejahteraan petani. Regulasi ini menjadi pedoman bagi petani, pelaku usaha, dan pemerintah daerah dalam mengelola produksi, distribusi, dan industri pengolahan ubi kayu di Provinsi Lampung¹².

peraturan gubernur lampung nomor 36 tahun 2025 pasal 17 ayat (1) tentang tata Kelola dan hilirisasi ubi kayu yaitu “pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait wajib melakukan pengawasan melekat terhadap lapak pembelian/penerimaan ubi kayu di wilayahnya”. Mengacu pada peraturan tersebut bahwa pelaku usaha lapak ubi kayu wajib melakukan pembelian atau penerimaan ubi kayu dari petani sesuai dengan ketentuan pemerintah terutama terkait: Timbangan, Perizinan, Pajak, serta Kualitas ubi kayu.

2. Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025

Pelaksanaan Pasal 17 ayat (1) juga dilakukan melalui sistem pengawasan terhadap pelaku usaha yang membeli ubi kayu dari petani. pemerintah kabupaten/kota, serta instansi terkait. Tim ini bertugas memastikan pelaku usaha mematuhi ketentuan dalam Peraturan gubernur. Pengawasan ini mencakup: (a) kesesuaian harga pembelian dengan harga acuan, (b) penerapan potongan kualitas (rafaksi); (c) transparansi penimbangan ubi kayu; (d) administrasi perizinan. Implementasi kebijakan ini juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan desa.¹³.

1. Pelaksanaan Oleh Pelaku Usaha

Pelaksanaan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu, pelaku usaha seperti lapak dan pabrik memiliki peran penting dalam proses pembelian hasil panen ubi kayu dari petani. Pelaksanaan di lapangan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari perizinan usaha, penerimaan hasil panen, penentuan kualitas, penimbangan, hingga pembayaran kepada petani. Sebelum menjalankan kegiatan

¹² Ayu, Khalisa, Komang Putri, Dan Ainu Rahmi. “Implementasi Kebijakan Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian.” *Jurnal Kebijakan Publik* 14, No. 4 (2023): 453–62. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id>.

¹³ peraturan gubernur lampung, “tata-kelola-dan-hilirisasi-ubi-kayu.pdf.”

usaha, pelaku usaha diwajibkan memiliki perizinan yang sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktiknya, pelaku usaha melakukan pembelian ubi kayu langsung dari petani dengan mempertimbangkan kualitas hasil panen. Penilaian kualitas biasanya dilihat dari kadar pati, kebersihan ubi, usia panen, dan kondisi fisik ubi kayu pada umumnya ubi kayu di panen petani dengan usia 8-9 bulan agar kualitas ubi kayu lebih maksimal. Semakin baik kualitas ubi kayu, maka harga yang diberikan cenderung lebih tinggi. Selain itu, pelaku usaha juga melaksanakan proses penimbangan untuk menentukan jumlah hasil panen yang akan dibayarkan kepada petani. Penimbangan ini seharusnya dilakukan menggunakan alat timbang yang telah tera ulang, alat timbangan yang ditera ulang dilakukan satu tahun sekali, hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk tera timbangan ulang. Agar hasilnya akurat dan tidak merugikan salah satu pihak tera timbangan harus diperiksa secara rutin agar lebih transparan. Selain itu izin operasional, serta kelengkapan administrasi lainnya sebagai bentuk legalitas usaha. Kepemilikan izin bertujuan agar kegiatan perdagangan ubi kayu dapat diawasi oleh pemerintah serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan usaha¹⁴. Selain itu, perizinan juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha lapak.

implementasi di lapangan masih ditemukan beberapa permasalahan. masih ada tiga pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha secara lengkap di desa sinar rejeki atau belum memperbarui izin operasionalnya. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan pemerintah menjadi kurang optimal dan membuka peluang terjadinya pelanggaran dalam kegiatan perdagangan ubi kayu¹⁵.

¹⁴ Uu Ri, "Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia," No. 3 (2013).

¹⁵ Darto c abc Susong Hermawan , Budiman Rusli, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik di Sektor Pertanian: Suatu Tinjauan Literatur" 10, no. 2 (2025): 187–99.

Hasil wawancara pelaku usaha mengenai pengawasan izin usaha antara lain:

- a. Pengawasan terhadap izin usaha dari pemerintah kurang optimal
- b. Pemeriksaan jarang dilakukan
- c. Kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap regulasi
- d. Biaya untuk mengurus perizinan mahal.

Hasil wawancara dengan pelaku usaha lapak ubi kayu. diperoleh informasi bahwa sebagian pelaku usaha telah memiliki izin usaha, namun masih terdapat pelaku usaha yang belum melengkapi legalitas usahanya. Pelaku usaha menjelaskan bahwa proses pengurusan izin dianggap memerlukan waktu yang cukup lama serta membutuhkan biaya administrasi sehingga sebagian pelaku usaha menunda pengurusan izin usaha.

Pelaku usaha juga menyampaikan (informan mukhtar, 2026). bahwa pengawasan terhadap izin usaha dari pemerintah masih kurang optimal. Pemeriksaan terkait legalitas usaha jarang dilakukan secara langsung di lapangan sehingga masih banyak usaha lapak ubi kayu yang tetap beroperasi meskipun belum memiliki izin lengkap serta membutuhkan waktu lama tera ulang timbangan kembali. Kondisi tersebut menyebabkan kurangnya kesadaran sebagian pelaku usaha terhadap pentingnya patuh terhadap regulasi.

Apabila pengawasan dilakukan secara rutin dan disertai pembinaan dari pemerintah, maka pelaku usaha akan lebih terdorong untuk menjalankan usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha berharap pemerintah tidak hanya memberikan pengawasan, tetapi juga membantu mempermudah proses tata niaga dan hilirisasi ubi kayu dapat berjalan secara tertib.

2. Pelaksanaa Dan Peranan Penmerintah

a. Peran Regulatif

Pemerintah daerah berfungsi sebagai regulator yang menetapkan kebijakan dan aturan mengenai tata kelola ubi kayu. Kebijakan tersebut dibuat untuk menciptakan keteraturan dalam kegiatan produksi, distribusi, hingga pemasaran ubi kayu. Pemerintah menetapkan standar mutu, mekanisme penimbangan, harga acuan, serta kewajiban pelaku usaha

dalam menjalankan usaha pengolahan ubi kayu. Melalui fungsi regulatif ini, pemerintah berupaya menciptakan kepastian hukum bagi petani dan pelaku usaha agar tidak terjadi praktik yang merugikan salah satu pihak¹⁶.

b. Peran Supervisi atau Pengawasan

Selain membuat kebijakan, pemerintah daerah juga memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan di lapangan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan, lapak, maupun pelaku usaha mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan gubernur. Bentuk pengawasan yang dilakukan antara lain: pemeriksaan alat timbang atau tera timbangan, pengawasan kualitas ubi kayu, pengawasan sistem pembayaran kepada petani, monitoring izin usaha, serta penindakan terhadap pelanggaran aturan. Pengawasan ini penting untuk mencegah terjadinya kecurangan, seperti manipulasi timbangan, pemotongan harga yang tidak sesuai, atau praktik perdagangan yang merugikan petani. Dengan adanya pengawasan yang baik, maka hubungan antara petani dan perusahaan dapat berjalan lebih adil dan transparan.

c. Peran Administratif

Pemerintah juga memiliki fungsi administratif, yaitu mengurus berbagai bentuk perizinan dan administrasi usaha. Dalam konteks tata kelola ubi kayu, pemerintah daerah berwenang menerbitkan izin usaha industri, izin operasional lapak, hingga dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan dan pengolahan ubi kayu. Perizinan bertujuan agar seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan hukum dan dapat diawasi dengan baik oleh pemerintah. Selain itu, administrasi yang tertib juga mempermudah pemerintah dalam mendata pelaku usaha,

¹⁶ peraturan gubernur lampung, “Petani Mengingat : Undang-Undang Nomor 8 tahun 2024,” 2024.

menentukan kebijakan, serta melakukan evaluasi terhadap perkembangan sektor hilirisasi ubi kayu di daerah¹⁷.

d. Peran Pembinaan dan Pendampingan

Pemerintah daerah juga berperan dalam memberikan pembinaan kepada petani dan pelaku usaha. Pembinaan dilakukan melalui sosialisasi peraturan, pelatihan peningkatan kualitas produksi, penyuluhan pertanian, hingga pendampingan dalam penggunaan teknologi pengolahan ubi kayu. Melalui pembinaan tersebut, diharapkan petani mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen sehingga dapat memenuhi standar industri. Selain itu, pemerintah juga mendorong terbentuknya kerja sama antara petani dan perusahaan agar tercipta hubungan kemitraan yang saling menguntungkan.

Hasil wawancara dengan kepala desa sinar rejeki (informan Iwan, 2026). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sinar Rejeki Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, diperoleh informasi bahwa pengawasan terhadap izin usaha lapak ubi kayu Antara lain:

- a. masih belum berjalan secara maksimal
- b. kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan instansi terkait
- c. kurangnya sosialisasi dan pembinaan .

Hasil wawancara kepala desa, keberadaan izin usaha sangat penting karena menjadi dasar legalitas bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan ubi kayu. Dengan adanya izin, pemerintah dapat melakukan pendataan, pembinaan, dan pengawasan terhadap aktivitas usaha lapak ubi kayu. Namun dalam pelaksanaannya, pengawasan izin usaha masih terkendala kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan instansi terkait dari pemerintah daerah.

¹⁷ Abdul Rahman, "Agricultural Transformation in Indonesia : Evaluation of Policy Implementation and Challenges Faced," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik* 12, no. 2 (2022): 691–700, homepage: <http://ojs.unm.ac.id/iap%0AAgricultural>.

Kepala desa juga menjelaskan bahwa sebagian pelaku usaha belum memahami pentingnya legalitas usaha sehingga mereka menjalankan usaha tanpa melengkapi administrasi perizinan. Selain itu, pengawasan dari dinas terkait belum dilakukan secara rutin sehingga masih terdapat usaha yang beroperasi tanpa pengawasan administratif yang jelas. Kepala desa berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya izin usaha serta melakukan pemeriksaan berkala terhadap legalitas lapak ubi kayu agar tercipta ketertiban usaha dan perlindungan terhadap petan¹⁸.

Hasil wawancara dengan kepala disperindang pemerintah daerah telah melaksanakan pengawasan terhadap lapak pembelian atau penerimaan ubi kayu sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan administrasi perizinan usaha, monitoring tera timbangan, pembinaan kepada pelaku usaha, serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait. Namun, pelaksanaan pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal karena keterbatasan jumlah petugas, luasnya wilayah pengawasan, serta banyaknya lapak ubi kayu yang tersebar di berbagai daerah.

Pihak dinas juga menjelaskan bahwa kegiatan tera ulang timbangan dilaksanakan secara berkala sesuai ketentuan metrologi legal. Akan tetapi, masih terdapat pelaku usaha yang belum melakukan tera ulang tepat waktu atau belum mengajukan permohonan pemeriksaan alat ukur. Selain itu, masih ditemukan pelaku usaha yang belum melengkapi dokumen perizinan sehingga memerlukan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut.

Menurut pihak dinas, kendala utama dalam implementasi Pasal 17 Ayat (1) adalah masih kurangnya koordinasi lintas instansi, rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha terhadap

¹⁸ Intan dkk, "Analisis Yuridis Efektivitas Pengawasan oleh Pemerintah terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan," *Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin* 3, no. 4 (2020): 1–8.

pentingnya legalitas usaha, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan secara rutin. Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan sosialisasi mengenai ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, serta meningkatkan intensitas pengawasan agar tata kelola dan hilirisasi ubi kayu dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan mampu memberikan perlindungan kepada petani. kendala dalam Implementasi Walaupun pemerintah telah menjalankan berbagai perannya, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan tersebut, antara lain:

a. Pengawasan Belum Merata

Pengawasan pemerintah di beberapa wilayah masih belum optimal. Hal ini disebabkan kurangnya kordinasi pemerintah terkait serta luasnya daerah penghasil ubi kayu mencapai kurang lebih 366.830 hektar di Provinsi Lampung sehingga tidak seluruh lapak atau perusahaan dapat dipantau secara rutin. Akibatnya, masih ditemukan pelanggaran seperti ketidaksesuaian timbangan dan ketidaktransparanan harga.

Tabel 2. Data temuan lapangan

No	Lokasi	Temuan Lapangan	Indikasi	Dampak
1.	Lapak ubi kayu di dusun srimukti desa sinar rejeki	Lapak tanpa izin oprasional Timbangan jarang dilakuakn pengecekan ulang Perbedaan kualitas ubi kayu tidak di periksa	Tidak seluruh pelaku usaha di periksa rutin Pengawasan alat timbang belum dilakukan secara menyeluruh Monitoring standar belum konsisten	Tidak transparan terhadap potongan dan harga Potensi kerugian petani dalam transaksi Menurunya standar mutu hasil panen

b. Lemahnya Penindakan terhadap Pelanggaran

beberapa kasus, pelanggaran yang terjadi belum mendapatkan sanksi yang tegas. Lemahnya penindakan menyebabkan sebagian pelaku usaha kurang patuh terhadap aturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan ketegasan pemerintah dalam memberikan sanksi administratif maupun tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

c. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Regulasi

Sebagian petani dan pelaku usaha masih belum memahami secara menyeluruh isi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025. Kurangnya sosialisasi menyebabkan implementasi kebijakan belum berjalan secara efektif. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat¹⁹.

Sebagai bentuk legalitas, perizinan juga berfungsi untuk menciptakan ketertiban dalam kegiatan perdagangan ubi kayu. Pelaku usaha yang memiliki izin wajib menjalankan usahanya sesuai aturan yang berlaku, sehingga praktik-praktik yang merugikan petani dapat diminimalisir. Misalnya, pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap penetapan harga, penggunaan alat timbang, serta kualitas transaksi jual beli antara petani dan pelaku usaha²⁰.

Perizinan juga menjadi instrumen pengendalian pemerintah dalam menjaga stabilitas tata niaga ubi kayu. Dengan adanya izin, pemerintah daerah dapat melakukan pendataan terhadap seluruh pelaku usaha sehingga lebih mudah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penindakan apabila terjadi pelanggaran. Hal ini penting karena sektor ubi kayu merupakan salah satu komoditas strategis di Provinsi

¹⁹ Nur Rahmah Yesa Peby Yola, Frenki, "Implementasi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani: Analisis Siyash Tanfidziyah Di Pekon Tanjung Raya Lampung Barat," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 409–20, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>.

²⁰ Maimun, Hakim, "Siyāsah Syar' iyyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710%0ASiyāsah>.

Lampung yang melibatkan banyak petani dan industri. Fungsi perizinan dalam tata kelola ubi kayu antara lain:

a. Menjamin Legalitas Usaha

Legalitas usaha menunjukkan bahwa pelaku usaha telah diakui secara resmi oleh pemerintah. Dengan memiliki izin usaha, pelaku usaha memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya. Legalitas ini juga memberikan perlindungan bagi petani karena mereka melakukan transaksi dengan pihak yang jelas identitas dan tanggung jawab hukumnya.

b. Mengontrol Aktivitas Pelaku Usaha

Melalui sistem perizinan, pemerintah dapat mengontrol aktivitas usaha mulai dari proses pembelian ubi kayu, penentuan harga, hingga distribusi hasil produksi. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah adanya praktik monopoli, permainan harga, ataupun kecurangan dalam proses transaksi yang dapat merugikan petani.

c. Menegakkan Standar Operasional

Perizinan mendorong pelaku usaha untuk menjalankan standar operasional yang sesuai ketentuan. Misalnya administrasi perizinan, penggunaan alat timbang yang sudah ditera, penerapan sistem pembayaran yang jelas, serta menjaga kualitas hasil produksi. Dengan standar operasional yang baik, hubungan antara petani dan pelaku usaha menjadi lebih adil dan transparan²¹.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah memperoleh izin. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui:

- a. Pemeriksaan administrasi izin usaha
- b. Pengawasan lapangan secara berkala

²¹ Ayu, Khalisa, Komang Putri, Dan Ainu Rahmi. "Implementasi Kebijakan Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian." *Jurnal Kebijakan Publik* 14, No. 4 (2023): 453–62. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id>.

- c. Pengecekan alat timbang dan tera ulang
- d. Pemantauan harga pembelian ubi kayu
- e. Penindakan terhadap pelanggaran izin usaha

Dalam praktiknya, pengawasan masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan kurangnya sarana pendukung, kurangnya koordinasi dan lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Akibatnya, masih ditemukan pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan.

Penelitian terdahulu umumnya membahas implementasi kebijakan publik di sektor pertanian, perizinan usaha, dan tata kelola pertanian secara umum, namun masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian (research gap). Pertama, penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji implementasi kebijakan usaha ubi kayu secara umum dan belum secara spesifik membahas pengawasan terhadap usaha lapak ubi kayu sebagai bagian dari tata niaga komoditas pertanian. Kedua, kajian mengenai implementasi kebijakan tata kelola ubi kayu masih berfokus pada aspek produksi, hilirisasi, atau kebijakan pertanian secara umum, sementara aspek pengawasan terhadap legalitas usaha, tera timbangan, pajak, dan pengendalian lapak pembelian masih relatif terbatas. Ketiga, penelitian sebelumnya belum banyak menghubungkan implementasi kebijakan daerah dengan perspektif Siyasa Tanfidziyah sebagai pendekatan dalam menilai tanggung jawab pemerintah terhadap pelaksanaan regulasi. Keempat, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis implementasi Pasal 17 ayat (1) Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang tata kelola dan hilirisasi ubi kayu, terutama pada konteks pengawasan lapak pembelian/penerimaan ubi kayu di tingkat lokal²². Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji implementasi pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha lapak ubi kayu berdasarkan perspektif Siyasa Tanfidziyah.

²² Norlailac Fahriana Nurrisaa, Dina Herminab, "Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , dan Analisis Data," *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran* 02, no. 03 (2025): 793–800, <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jtpp/index> .

3. Dampak lemahnya pengawasan lapak pembelin ubi kayu bagi petani

a. Terjadinya Kecurangan Timbangan

Lemahnya pengawasan pemerintah menyebabkan masih adanya lapak ubi kayu yang melakukan manipulasi timbangan. Kondisi ini merugikan petani karena hasil panen yang dijual tidak dihitung secara jujur sehingga pendapatan petani berkurang.

b. Harga Pembelian Tidak Stabil

Kurangnya pengawasan terhadap izin usaha dan tata niaga ubi kayu menyebabkan pelaku usaha dapat menentukan harga secara sepihak. Akibatnya, petani sering menerima harga yang rendah dan tidak sesuai dengan kualitas hasil panen.

c. Munculnya Lapak Ubi Kayu Ilegal

Lemahnya penertiban membuat banyak lapak beroperasi tanpa izin resmi. Lapak ilegal biasanya tidak mengikuti aturan usaha yang berlaku sehingga berpotensi melakukan praktik yang merugikan petani.

d. Tidak Adanya Kepastian Hukum bagi Petani

Apabila terjadi sengketa dalam transaksi, petani sulit memperoleh perlindungan hukum karena usaha yang dijalankan oleh lapak tidak memiliki legalitas resmi. Hal ini membuat posisi petani menjadi lemah.

e. Menurunnya Kepercayaan Petani kepada Pemerintah

Kurangnya pengawasan dan tindakan tegas dari pemerintah dapat menimbulkan anggapan bahwa pemerintah belum maksimal melindungi kepentingan petani. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah menurun.

f. Terhambatnya Kesejahteraan Petani

Kerugian akibat kecurangan timbangan, rendahnya harga jual, dan ketidakjelasan sistem tata niaga berdampak langsung pada pendapatan petani. Jika terus terjadi, kondisi ini dapat menurunkan kesejahteraan petani ubi kayu.

g. Terciptanya Tata Niaga yang Tidak Tertib

Lemahnya pengawasan menyebabkan sistem perdagangan ubi kayu berjalan tanpa aturan yang jelas. Akibatnya, persaingan usaha

menjadi tidak sehat dan kegiatan tata niaga sulit dikendalikan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani ubi kayu diketahui bahwa petani menginginkan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap izin usaha lapak ubi kayu. Menurut petani, (informan Sarda, 2026).lapak yang memiliki izin resmi cenderung lebih tertib dalam melakukan transaksi pembelian ubi kayu dibandingkan lapak yang tidak memiliki legalitas usaha.

Petani menjelaskan bahwa masih terdapat lapak ubi kayu yang beroperasi tanpa izin namun tetap melakukan pembelian hasil panen petani. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena pengawasan pemerintah terhadap sistem timbangan, harga, dan kualitas transaksi menjadi sulit dilakukan. Petani menilai lemahnya pengawasan izin usaha dapat membuka peluang terjadinya kecurangan yang merugikan petani.

Selain itu, petani menyampaikan bahwa pemerintah belum maksimal dalam melakukan penertiban terhadap usaha yang tidak memiliki izin. Oleh karena itu, petani berharap pemerintah daerah dapat melakukan pendataan ulang terhadap seluruh lapak ubi kayu serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang tidak memiliki izin resmi. Dengan adanya pengawasan izin usaha yang baik, petani berharap tercipta keadilan, transparansi, dan perlindungan hukum dalam kegiatan tata niaga ubi kayu.

4. Siyasah Tanfizdiyah

Siyasah Tanfizdiyah adalah cabang dari fiqh siyasah yang membahas kekuasaan eksekutif (tanfidz), yaitu pelaksanaan kebijakan dan peraturan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam konsep ini, pemerintah tidak hanya berwenang membuat kebijakan, tetapi juga berkewajiban menjalankan, mengawasi, mengevaluasi, dan menegakkan aturan secara adil, efektif, dan bertanggung jawab. Keberhasilan pemerintahan diukur dari sejauh mana kebijakan benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam penelitian ini, keterkaitan Siyasah Tanfidziyah terlihat pada pelaksanaan Pasal 17 Ayat (1) yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap lapak pembelian atau penerimaan ubi kayu. Pemerintah bertindak sebagai pelaksana kebijakan (eksekutif) yang bertanggung jawab memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan mengenai perizinan, tara timbangan, pembayaran pajak, dan kualitas ubi kayu. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan pemerintah menjadi indikator keberhasilan penerapan prinsip Siyasah Tanfidziyah.

5. Implementasi pengawasan Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Siyasah tanfidziyah merupakan konsep dalam fiqh siyasah yang membahas mengenai pelaksanaan atau eksekusi kebijakan pemerintahan oleh pemegang kekuasaan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam perspektif ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi eksekutif, pengawasan, serta memastikan kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan adil.

Implementasi Pasal 17 ayat (1) Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2025 memiliki hubungan erat dengan siyasah tanfidziyah karena substansi aturan tersebut menempatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana utama dalam melakukan pengawasan terhadap tata kelola dan hilirisasi ubi kayu, termasuk aspek perizinan, pajak timbangan, dan kualitas ubi kayu. Pengawasan yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan eksekutif agar aktivitas usaha berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari adanya regulasi, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaan di lapangan. Apabila pengawasan perizinan belum merata, masih terdapat pelaku usaha tanpa izin, atau lemahnya kontrol terhadap kualitas dan timbangan, maka hal tersebut menunjukkan belum optimalnya fungsi tanfidziyah dalam menjalankan amanah pemerintahan²³. Prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah antara lain:

²³ Refita Aprelia dan Agustina Nurhayati, "Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera : Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah," *As-*

Tabel 3: Analisis

No	Prinsip Siyasah	Kondisi Ideal	Temuan Lapangan	Tingkat Kesesuaian
1.	Amanah	Pemerintah memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap perizinan timbangan kualitas ubi kayu dan pajak	Masih ditemukan lapak yang beroperasi tanpa izin pengawasan belum rutin serta antar instansi masih lemah	Kurang sesuai
2.	Keadilan	Seluruh pelaku usaha harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam pengawasan dan penegakan aturan	Sebagian pelaku telah memenuhi ketentuan umum, namun masih ada pelaku usaha yang tidak memiliki izin dan belum mendapatkan penindakan yang tegas	Kurang sesuai
3.	Masalahah	Kebijakan pengawasan bertujuan melindungi petani dengan menciptakan tata niaga ubi kayu dan menguntungkan semua pihak	Lemahnya pengawasan menyebabkan potensi kerugian petani akibat ketidakjelasan timbangan kualitas dan harga	Cukup sesuai

			pembelian ubi kayu	
4.	Hisbah	Pemerintah wajib melakukan pengawasan aktif terhadap lapak pembelian/penerimaan ubi kayu	Pengawasan belum merata pemeriksaan lapnagn jarang di lakukan serta monitoring timbangan dan kualitas belum konsisten	Kurang sesuai
5.	Tanfizdiyah Al-ahkam	Atuaran pergub no. 36 tahun 2025 harus diterapkan secara konsisten di sertai sanksi terhadap pelanggaran	Penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar masih lemah serta kepatuhan terhadap aturan belum optimal	Kurang sesuai

a. Prinsip Amanah

Prinsip Amanah dalam Perizinan Prinsip amanah dalam Siyasa Tanfizdiyah menekankan bahwa pemerintah wajib menjalankan tugas dan kewenangannya secara bertanggung jawab, khususnya dalam proses pemberian dan pengawasan perizinan usaha. Perizinan merupakan bentuk pengendalian pemerintah terhadap kegiatan usaha agar berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat, terutama petani ubi kayu.

pemerintah tidak hanya bertugas menerbitkan izin, pengawasn timbangan, pajak dan kualitas ubi kayu, tetapi juga memastikan hal tersebut dipatuhi dan dijalankan sesuai ketentuan. Namun fakta di lapangan menunjukan Masih adanya pelaku usaha tanpa izin menunjukkan lemahnya pelaksanaan amanah pemerintah dalam pengawasan perizinan. Pemerintah belum optimal dalam melakukan penertiban dan pengawasan terhadap usaha ubi kayu, kurangnya pengawasan

menyebabkan tata kelola usaha menjadi tidak tertib. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan, melakukan pendataan ulang terhadap lapak ubi kayu, serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan. Allah Swt. Berfirman (QS. An-Nisa': 58).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa': 58)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa amanah harus dijalankan dengan baik oleh pemegang kekuasaan. Dalam konteks implementasi Pasal 17 ayat (1) Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2025, pemerintah memiliki amanah untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha ubi kayu memiliki izin resmi sebelum menjalankan usahanya.

b. Prinsip Keadilan (Al-Adalah) dalam Perizinan

Prinsip keadilan (al-adalah) mengandung makna bahwa pemerintah harus memperlakukan seluruh pelaku usaha secara adil tanpa membedakan pihak tertentu. Keadilan berarti seluruh pelaku usaha wajib mengikuti aturan yang sama dan memperoleh perlakuan hukum yang setara. Namun yang terjadi di lapangan pemerintah belum melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaku usaha lapak ubi kayu.

Berdasarkan temuan lapangan, aspek pengawasan perizinan, tera ulang timbangan kualitas ubi kayu masih menjadi tantangan karena belum seluruh lapak atau pelaku usaha ubi kayu belum diawasi secara keseluruhan sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidak seimbangan dalam pelaksanaan pengawasan, sebab pelaku usaha yang telah

memenuhi persyaratan administrasi dan pengecekan tera timbangan berada pada posisi yang berbeda dengan pelaku usaha yang tidak terawasi oleh pemerintah terkait. Lemahnya pengawasan akan berdampak antara lain: (1) Pelaku usaha tanpa izin menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang telah mematuhi aturan; (2) Lemahnya penegakan hukum menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip keadilan. Allah Swt. berfirman: (QS. Al-Ma'idah: 8).

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Ma'idah: 8)

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan dalam seluruh aspek pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan tata Kelola dan hilirisasi ubi kayu.

Dalam perspektif siyasah tanfidziah, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan keadilan administratif karena pemerintah belum sepenuhnya memastikan bahwa seluruh pelaku usaha tunduk pada kewajiban hukum yang sama. (Irwansyah & Setiawan, 2023).

c. Prinsip Masalah (Kemaslahatan Umum)

Prinsip masalah dalam ekonomi Islam menekankan bahwa setiap kebijakan dan aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat, kesejahteraan, dan perlindungan bagi masyarakat luas. Seluruh aturan yang dibuat pemerintah harus bertujuan menciptakan kebaikan bersama, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Dalam konteks perizinan usaha, legalitas seharusnya menjadi alat untuk menjaga keseimbangan ekonomi, melindungi masyarakat kecil, dan

mencegah terjadinya kerugian sosial maupun lingkungan. Allah SWT berfirman (QS. Al-Ma'idah: 2).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
أَمِينَ الْأَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”. (QS. Al-Ma'idah: 2).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap kebijakan harus diarahkan pada terciptanya kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus saling bekerja sama dalam menciptakan kegiatan ekonomi yang adil dan bermanfaat.

Prinsip masalah mengajarkan bahwa tujuan utama kebijakan adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, izin usaha tidak boleh hanya dijadikan formalitas administrasi, tetapi harus benar-benar mampu melindungi masyarakat dari dampak negatif kegiatan usaha. Jika pengawasan terhadap izin usaha lemah, maka berbagai pelanggaran dapat terjadi, seperti penyalahgunaan

lahan, eksploitasi sumber daya, hingga ketidakadilan terhadap petani dan masyarakat kecil²⁴.

Legalitas usaha seharusnya menjadi sarana perlindungan hukum agar pelaku usaha menjalankan aktivitasnya sesuai aturan. Dengan adanya pengawasan yang baik, kegiatan usaha dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, terbukanya lapangan pekerjaan, serta terciptanya keadilan ekonomi. Sebaliknya, jika prinsip masalah diabaikan, maka kebijakan ekonomi justru dapat menimbulkan kerugian sosial dan ketimpangan dalam masyarakat. (Rosyidi, 2024).

d. Prinsip Hisbah (Pengawasan)

Hisbah merupakan prinsip pengawasan dalam Islam yang bertujuan menjaga ketertiban, kejujuran, dan keadilan dalam kehidupan ekonomi maupun sosial. Dalam ekonomi Islam, pengawasan memiliki peranan penting agar seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai syariat dan aturan hukum yang berlaku. Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta melindungi hak-hak masyarakat. Allah SWT berfirman (QS. Ali ‘Imran: 104).

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar.” (QS. Ali ‘Imran: 104).

Ayat tersebut menjadi dasar pentingnya pengawasan dalam Islam. Pengawasan dilakukan agar setiap aktivitas tetap

²⁴ Agustina Nurhayati dan Dwi Surya, “Halal Certification for Micro and Small Businesses in Bandar Lampung , Indonesia : An Evaluation from the Maslahah Perspective,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2023), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

berada pada jalan yang benar dan tidak menimbulkan kerusakan dalam masyarakat.

Prinsip hisbah menegaskan bahwa pemerintah atau pihak berwenang memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha. Pengawasan yang lemah akan membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum, penyalahgunaan izin, dan berbagai bentuk kecurangan yang merugikan Masyarakat. Tidak adanya kontrol yang ketat dapat menyebabkan pelanggaran terus berulang karena pelaku usaha merasa tidak diawasi dan tidak takut terhadap sanksi. Akibatnya, ketertiban ekonomi menjadi terganggu dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Oleh sebab itu, pengawasan harus dilakukan secara aktif, konsisten, dan transparan. Dalam Islam, pengawasan bukan hanya bertujuan mencari kesalahan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan bersama. Dengan pengawasan yang baik, kegiatan usaha dapat berjalan secara sehat, tertib, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

e. Prinsip Tanfidz al-Ahkam (Pelaksanaan Hukum)

Prinsip tanfidz al-ahkam menekankan bahwa hukum harus dilaksanakan secara nyata dan konsisten, bukan hanya menjadi aturan tertulis tanpa penerapan. Dalam ekonomi Islam, penegakan hukum sangat penting untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban dalam masyarakat. (Maimun dan Hakim 2023). Semua pihak wajib mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi menjaga keseimbangan. Allah SWT berfirman (QS. An-Nisa': 135)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau

kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa’: 135)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan dengan sungguh-sungguh tanpa membedakan kedudukan seseorang. Prinsip *tanfidz al-ahkam* mengajarkan bahwa suatu aturan tidak akan memberikan manfaat apabila tidak diterapkan secara nyata. Dalam pelaksanaan izin usaha, hukum harus ditegakkan secara tegas kepada seluruh pihak yang melakukan pelanggaran. Jika hukum hanya dijadikan formalitas administrasi tanpa pengawasan dan sanksi yang jelas, maka pelanggaran akan terus terjadi. penegakan hukum yang lemah dapat menyebabkan munculnya ketidakadilan dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, sanksi yang tegas diperlukan agar pelaku usaha mematuhi aturan yang berlaku dan tidak melakukan penyimpangan. Pelaksanaan hukum yang konsisten juga menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah dalam menjaga ketertiban ekonomi. Dengan adanya penegakan hukum yang adil dan tegas, masyarakat akan merasa terlindungi dan kegiatan ekonomi dapat berjalan secara lebih tertib serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu di Desa Sinar Rejeki, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, belum berjalan secara optimal. Pemerintah daerah telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap lapak pembelian/penerimaan ubi kayu melalui pengawasan perizinan,

tera timbangan, kualitas ubi kayu, dan pajak yang jarang dilakukan pengecekan secara berkala. Sehingga masih ditemukan sejumlah permasalahan, seperti adanya lapak yang belum memiliki izin usaha lengkap, pengawasan timbangan yang belum dilakukan secara rutin, kurangnya transparansi dalam transaksi, serta lemahnya koordinasi antar instansi terkait. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 Ayat (1) belum sepenuhnya tercapai.

Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan ini antara lain keterbatasan pengawasan lapangan, kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha dan petani, rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha, serta belum optimalnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Akibatnya, masih terdapat praktik yang berpotensi merugikan petani, seperti ketidakjelasan sistem penimbangan, ketidakstabilan harga, dan beroperasinya lapak tanpa izin resmi.

Ditinjau dari perspektif Siyash Tanfidziyah, pelaksanaan Pasal 17 Ayat (1) belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan, maslahah, hisbah, dan tanfidz al-ahkam. Pemerintah sebagai pemegang amanah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku serta memberikan perlindungan yang adil kepada petani. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan yang lebih konsisten, penguatan koordinasi antar instansi, sosialisasi yang berkelanjutan, serta penegakan hukum yang tegas agar tata kelola dan hilirisasi ubi kayu dapat berjalan secara efektif, adil, dan mampu mewujudkan kemaslahatan serta kesejahteraan masyarakat, khususnya petani ubi kayu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah Sunardiyono Putri, Bambang Hari Wibisono. "Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian The Implementation Of Sustainable Food." *Jurnal Kebijakan Publik* 13, No. 4 (2022): 323–30. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id>.
- Aprilia, Refita, Dan Agustina Nurhayati. "Implementation Of Religious Services Policy For The Elderly In South Sumatera :

- Analysis Of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah.” *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 3, No. 2 (2023).
[Http://Dx.Doi.Org/10.24042/As-Siyasi.V3i2.21222%0aimplementation](http://Dx.Doi.Org/10.24042/As-Siyasi.V3i2.21222%0aimplementation).
- Arrizal, Brian Hafiz, Resa Piska Ramadhan, Dan Akhmad Fahrurrizkianur. “Analisis Pentingnya Legalistas Usaha (Daftar Izin Usaha) Bagi Perusahaan.” *Media Hukum Indonesia* 2, No. 4 (2024): 298–308.
[Https://Ojs.Daarulhuda.Or.Id/Index.Php/MHI/Index](https://Ojs.Daarulhuda.Or.Id/Index.Php/MHI/Index).
- Ayu, Khalisa, Komang Putri, Dan Ainu Rahmi. “Implementasi Kebijakan Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian.” *Jurnal Kebijakan Publik* 14, No. 4 (2023): 453–62.
[Https://Jkp.Ejournal.Unri.Ac.Id](https://Jkp.Ejournal.Unri.Ac.Id).
- Dody Setyawan¹, Agus Priantono NC², Firman Firdausi³. “Model George Edward Iii : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018” *Jurnal Politik, Sosial & Kebijakan Publik (Publicio)* 3, No. 2 (2021): 9–19.
- Fahriana Nurrisaa, Dina Herminab, Norlailac. “Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , Dan Analisis Data.” *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran* 02, No. 03 (2025): 793–800. [Https://Jurnal.Kopusindo.Com/Index.Php/Jtpp/Index](https://Jurnal.Kopusindo.Com/Index.Php/Jtpp/Index) E-ISSN.
- Indriati Agustina Gultom¹, Ayu Kartika Puspa², Yanuarius Yanu Dharmawan³, Achmad Subing⁴ Universitas. “Analisis Perencanaan Sektor Pertanian Berbasis Korporasi.” *Jurnal Visionist* 9, No. September (2020).
- Intan Dkk. “Analisis Yuridis Efektivitas Pengawasan Oleh Pemerintah Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan.” *Jurnal Pustakanusantara Multidisplin* 3, No. 4 (2020): 1–8.
- Maimun, Hakim. “Siyāsah Syar ’ Iyyah And Its Application To Constitutional Issues In Indonesia.” *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 3, No. 1 (2024).
[Https://Doi.Org/10.24042/As-Siyasi.V3i1.15710%0asiyāsah](https://Doi.Org/10.24042/As-Siyasi.V3i1.15710%0asiyāsah).
- Malahati, Fildza. “Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi.” *Jurnal Pendidikan Dasar* 11, No. 2 (2023): 341–48.

- Miles Dan Huberman. *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications, Inc. 2455 Teller Road Thousand Oaks, California 91320, 2014.
- Nurhayati, Agustina, Dan Dwi Surya. “Halal Certification For Micro And Small Businesses In Bandar Lampung , Indonesia : An Evaluation From The Maslahah Perspective.” *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 3, No. 1 (2023). [Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Assiyasi](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Assiyasi).
- Patari, Emmy, Paranoan Natalia. “Tantangan Dan Solusi Dalam Pengawasan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam.” *Jurnal Ekonomi Holistik* 1, No. 2 (2025): 198–204.
- Peraturan Gubernur Lampung. “Petani Mengingat : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024,” 2024.
- Peraturan Gubernur Lampung. “Tata-Kelola-Dan-Hilirisasi-Ubi-Kayu.Pdf.” Bandar Lampung: Bandar Lampung 31-10-2025, 2025.
- Prasiwi, Safira Diah, Lailul Mursyidah, Dan Slamet Hari Sutanto. “Volume 18 Nomor 1 Juni 2024 Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi Usaha Mikro Dan Kecil Topi Di Desa Punggul , Kabupaten Sidoarjo).” *Jurnal Utbang Kebijakan* 18, No. 666 (2024): 59–73. [Https://Doi.Org/10.32781/Cakrawala.V18i1.629](https://doi.org/10.32781/Cakrawala.V18i1.629).
- Rahman, Abdul. “Agricultural Transformation In Indonesia : Evaluation Of Policy Implementation And Challenges Faced.” *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik* 12, No. 2 (2022): 691–700. Homepage: [Http://Ojs.Unm.Ac.Id/Iap%0aagricultural](http://Ojs.Unm.Ac.Id/Iap%0aagricultural).
- Susong Hermawan , Budiman Rusli, Darto C Abc. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik Di Sektor Pertanian: Suatu Tinjauan Literatur” 10, No. 2 (2025): 187–99.
- Uu Ri. “Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Presiden Republik Indonesia,” no. 3 (2013).
- Yesa Peby Yola, Frenki, Nur Rahmah. “Implementasi Pasal 21 Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani: Analisis Siyasah Tanfidziyah Di Pekon Tanjung Raya Lampung Barat.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 409–20. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>.





Lampiran 1: surat izin penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
Jl. Lintas Sumatra Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda 35551
Kabupaten Lampung Selatan

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 500.16.7.4/0390/IV.17/2026

1. Nama : **AGUNG ROMADON**

2. Alamat : Dusun V RT/RW : 001/001, PURWOTANI, JATI AGUNG, LAMPUNG SELATAN

3. Judul Penelitian : Implementasi Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Gubernur Lampung No. 36 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu Perspektif Siyasah Tanfidzyah (Studi di Desa Sinar Rezeki Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan)

4. Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Implementasi Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Gubernur Lampung No. 36 Tahun 2025 di Dusun Srimukti Desa Sinar Rezeki Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan

5. Lokasi Penelitian : Dusun Srimukti Desa Sinar Rezeki Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan

6. Tanggal dan/atau lamanya Penelitian : Mei - Juni 2026

7. Bidang Penelitian : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

8. Status Penelitian : -

9. Nama Penanggung Jawab atau : Efa Rodiah Nur

10. Anggota Penelitian : AGUNG ROMADON

11. Nama Badan Hukum, Lembaga, atau Organisasi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Dengan ketentuan sebagai

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah.
2. Setelah Penelitian Selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP)
3. Surat Keterangan Penelitian berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal

DIKELUARKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 05 Mei 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

 
RIO GISMARA, SH
NPG 48830320 201001 1 011

Lampiran 2: Surat Balasan Desa Sinar Rejeki

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
	DESA SINAR REJEKI
	KECAMATAN JATI AGUNG
	Email : admin@sinarrejeki.desa.id Website : https://sinarrejeki.desa.id
Jl. Raya Sinar Rejeki Gg. Nauri No. 01 Desa Sinar Rejeki Kec. Jati Agung Lampung Selatan	
<u>SURAT IZIN PENELITIAN</u>	
Nomor : 140.18.01.13.2014/ 004 /V/2026	
<i>Assalamualaikum Wr. Wb.</i>	
Menindaklanjuti Surat Permohonan Izin Riset oleh Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung	
Fakultas Syariah Nomor B.1894/Un.16/DS/PP.009/04/2026 tertanggal 29 April 2026 pemohon :	
Nama	: AGUNG ROMADON
NPM	: 2221020204
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian	: IMPLEMENTASI PASAL 17 AYAT (1) PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG TATA KELOLA DAN HILIRISASI UBI KAYU PERSPEKTIF SIYASAH TANFIZDIYAH
Tempat Penelitian	: Dusun Srimukti Desa Sinar Rejeki Kec. Jati Agung Lampung Selatan
Dengan ini saya selaku kepala Desa Sinar Rejeki Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan memberikan izin kepada nama tersebut di atas untuk melaksanakan riset di Wilayah Desa Sinar Rejeki. Untuk selanjutnya dimohon kepada yang bersangkutan untuk bisa berkoordinasi dengan baik ke pihak-pihak yang akan menjadi objek penelitian dan tetap menjaga keamanan dan ketertiban dengan warga setempat. Demikian Surat Izin ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Sinar Rejeki, 07 Mei 2026 Kepala Desa Sinar Rejeki  IRWAN SYAMSURI	

Lampiran 3: Letter Of Acceptance



Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam
Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Jl. Panglima Besar Sudirman No. 360 Kraksaan Probolinggo, 67282 Telp/Fax: +62-0335-842-178
Online ISSN: 2548-5903 Print ISSN: 2460-3856

LETTER OF ACCEPTANCE NOMOR: 13/LPJ.LP3M/V/2026

Kepada
Yth. **Agung Romadon, Relit Nur Edi, Iip Nurul Topani**
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Dengan hormat,
Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak/Ibu atas pengiriman naskah artikel ilmiah kepada Asy-Syariah Jurnal Hukum Islam. Dengan ini kami sampaikan bahwa:

Judul Naskah : Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*
Penulis Artikel : Agung Romadon, Relit Nur Edi, Iip Nurul Topani
Tanggal Diterima : 16 Mei 2026
No. Naskah : 2529

Dinyatakan **"DITERIMA"** untuk diterbitkan dalam **Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam Vol. 12 No.2 Juni 2026**.

Naskah tersebut akan diproses sesuai dengan aturan dan ketentuan penerbitan artikel ilmiah nasional yang diadaptasi oleh Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam. Oleh karena itu, kami memohon kerja sama Bapak/Ibu agar proses publikasi ini dapat berjalan dengan baik. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

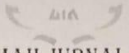
Probolinggo, 17 Mei 2026

Journal Manager



Dr. Muhammad Hudil Islam, M.Pd
NIDN. 2114128802

Lampiran 4: Surat Keterangan Rumah Jurnal



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: dan

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Agung Ramadan
NPM : 2221020204
Prodi : Hukum Tata Negara

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (full note, with ibid)</i> .	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung.	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 04 Juni 2026
Rumah Jurnal
Ketua,



Prof. Dr. H. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001



- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- Verifikasi ttd pada QR code.

Lampiran 5: Blanko Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

BLANKO KONSULTASI

Nama : Agung Romadon
NPM : 2221020204
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Tata negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Dan Hilirisasiubi Kayu Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

NO.	Tgl. Konsultasi	Keterangan	Paraf	
			Pemb. I	Pemb. II
1.	6 Oktober 2025	Konsultasi judul skripsi		f
2.	9 Desember 2025	Ace judul Oleh Pemb. II		f
3.	03 Februari 2026	Bimbingan proposal oleh Pemb. II		f
4.	03 Februari 2026	Ace proposal untuk diseminarkan oleh Pemb. II		f
5.	27 April 2026	Ace proposal untuk penelitian oleh Pemb. I dan II		f
6.	29 April 2026	Bimbingan artikel oleh Pemb. I dan II	f	f
7.	10 Mei 2026	Ace artikel untuk di Submit oleh Pemb.I dan II	f	f
8.	17 Mei 2026	LoA artikel keluar	f	
9.	25 Juni 2026	Ace munaqasyah artikel oleh Pemb. I dan II untuk di sidangkan	f	f

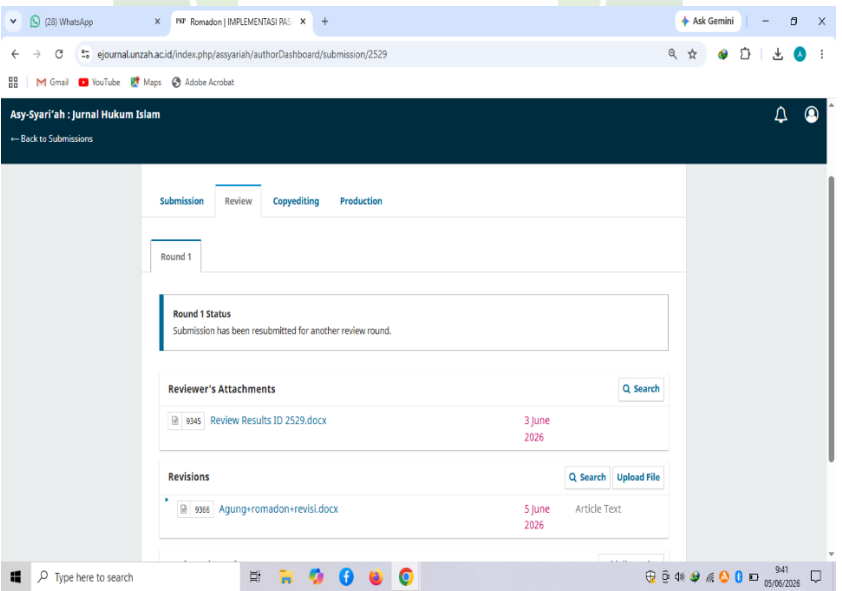
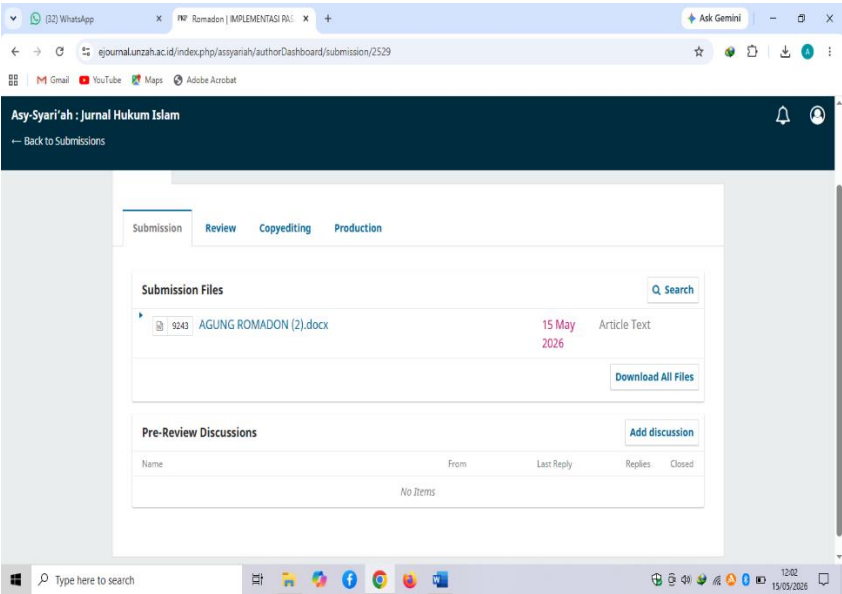
Pembimbing I

Dr. Relif Nur Edl, S.Ag. M.Kom.I.
 NIP. 196901051998031003

Pembimbing II

Iip Nurul Topan, S.H M.H.
 NIP. 198709242025212063

Lampiran 6: Bukti Submit Dan Revisi Artikel di Rumah Jurnal Asy-Syari’ah



Lampiran 7: Hasil Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703278

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 3501/Un.16 /P1 /KT/VII /2026

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Eni Amallah, S.Ag., S.S., M.Ag.
NIP : 197005121998032002
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Penelitian Karya Ilmiah dengan Judul :

**IMPLEMENTASI PASAL 17 AYAT (1) PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 36
TAHUN 2025 TENTANG TATA KELOLA DAN HILIRISASIUBI KAYU PERSPEKTIF SIYASAH
TANFIDZIYAH**

Karya :

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Agung Romadon	2221020204	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 14% dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 16 Juli 2026
Ridha UPT Perpustakaan



Dr. Eni Amallah, S.Ag., S.S., M.Ag.
NIP.197005121998032002

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli UPT Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Karya Ilmiah Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di UPT Perpustakaan.

RADEN INTAN LIBRARY

IMPLEMENTASI PASAL 17 AYAT (1) PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG TATA KELOLA D...

 SKRIPSI 2

Document Details

Submission ID

trnoid::3618:145719734

Submission Date

16 Jul 2026, 10:58 GMT+7

Download Date

16 Jul 2026, 11:01 GMT+7

File Name

AGUNG ROMADON-1.docx

File Size

326.4 KB

15 Pages

6,246 Words

43,238 Characters

14% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

- 14%  Internet sources
- 6%  Publications
- 9%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

14%  Internet sources
6%  Publications
9%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	IAIN Purwokerto on 2026-06-22	2%
2	Internet	ejournal.unzah.ac.id	2%
3	Internet	nuwobalak.com	1%
4	Internet	ahmadzain.com	1%
5	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2026-03-04	<1%
6	Internet	muhammadlyahpekajangan.or.id	<1%
7	Internet	journal.cattleyadf.org	<1%
8	Internet	ojs.ukipaulus.ac.id	<1%
9	Internet	islamina.id	<1%
10	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2026-04-02	<1%
11	Internet	repository.iainpare.ac.id	<1%

12	Internet	digitalib.lainkendari.ac.id	<1%
13	Internet	journal.univetbantara.ac.id	<1%
14	Internet	bulir.id	<1%
15	Internet	ejournal.aripi.or.id	<1%
16	Internet	ejournal.unikama.ac.id	<1%
17	Internet	ejournal.upnvj.ac.id	<1%
18	Internet	journal.unibos.ac.id	<1%
19	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2025-11-26	<1%
20	Internet	dinamik.id	<1%
21	Internet	lab.tik.pnj.ac.id	<1%
22	Internet	repository.iainpurwokerto.ac.id	<1%
23	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%
24	Student papers	Fakultas Hukum Universitas Lampung on 2022-08-08	<1%
25	Student papers	UIN KH. Achmad Siddiq Jember on 2026-05-19	<1%

26	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
27	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%
28	Student papers	Politeknik Pariwisata NHI Bandung on 2026-04-29	<1%
29	Student papers	UPA Perpustakaan UNTIRTA on 2026-06-15	<1%
30	Internet	docplayer.info	<1%
31	Internet	eprints.uad.ac.id	<1%
32	Internet	kkn.unnes.ac.id	<1%
33	Internet	legamp.id	<1%
34	Internet	repository.uinsalzu.ac.id	<1%

Lmpiran 8: publikasi jurnal

Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam
12 (2), 2026, 120-135

Available at: <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah>



Implementation of Article 17 Paragraph (1) of Lampung Governor's Regulation Number 36 of 2025 Concerning Cassava Governance and Downstream from the *Perspective of Siyasaah Tanfidziyah*

Agung Romadon*, Relit Nur Edi, Iip Nuruul Topani

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Indonesia

Email: agungrmd19@gmail.com

*Corresponding Author.

Abstract: This study aims to analyze the implementation of Article 17 Paragraph (1) of the Lampung Governor's Regulation Number 36 of 2025 concerning Cassava Governance and Downstream and review it from the perspective of *Siyasaah Tanfidziyah*. The article regulates the obligation of local governments to supervise the purchase or receipt of cassava stalls in order to create an orderly, fair, and protective trading system for farmers. This research uses a qualitative method. Data was obtained through interviews, observations, and documentation involving village heads, cassava stalls, and farmers in Sinar Rejeki Village, Jati Agung District, South Lampung Regency. The data was analyzed descriptively by linking the field findings with the provisions of laws and regulations and the theory of *Siyasaah Tanfidziyah*. The results of the study showed that the implementation of Article 17 Paragraph (1) had not been running optimally. Supervision of business licensing, weighing marks, cassava quality, and trade systems still faces various obstacles, such as lack of coordination between agencies, limited field supervision, low awareness of business actors on business legality, and weak enforcement of sanctions for violations. This condition has led to the discovery of stalls operating without permits, a lack of transparency in transactions, and potential losses for farmers. Viewed from the perspective of *Siyasaah Tanfidziyah*, the implementation of this policy has not fully reflected the principles of trust, justice, *maslahah*, *hisbah*, and *tanfidz al-ahkam* because supervision and enforcement of rules have not been carried out optimally. Therefore, it is necessary to strengthen supervision, improve coordination between agencies, continuous socialization, and stricter law enforcement so that the goals of cassava governance and downstream can be realized effectively and provide benefits to the community.

Keywords: Policy Implementation, Supervision, Governance and Downstream Cassava, *Siyasaah Tanfidziyah*.

How to Cite: Romadon, A., Relit, N.E., & Topani, I.N. (2026). Implementation of Article 17 Paragraph (1) of Lampung Governor's Regulation Number 36 of 2025 Concerning Cassava Governance and Downstream from the *Perspective of Siyasaah Tanfidziyah*. *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 12 (2), 120-135. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v12i2.2529>

Introduction

Policy implementation is an important stage in the implementation of government because the success of a regulation is not only determined by the quality of the legal substance, but also by the effectiveness of its implementation in the field. A policy that has been set will be difficult to achieve its goals if it is not supported by a good implementation system, optimal supervision, coordination between institutions, and compliance of the parties who are the target of the policy. Therefore, implementation is the main indicator in assessing the success or not of a regulation made by the local government. The Lampung Provincial Government stipulates Lampung Governor Regulation Number 36 of 2025 concerning Cassava Governance and Downstream as a legal instrument to regulate the cassava commodity governance system in a directed and sustainable manner. In the regulation, Article

This is an open access article under the [CC-BY](#) license.

 <https://doi.org/10.55210/assyariah.v12i2.2529>



17 paragraph (1) has an important position because it is related to the implementation of government functions in carrying out supervision, guidance, and control of the implementation of cassava governance and downstreaming. The implementation of this article is an important aspect to study because the implementation of regulations in the field often faces various obstacles, such as weak coordination, limited supervision, and there is still a discrepancy between normative provisions and empirical conditions (Aminah Sunardiyono Putri, 2022).

Lampung is the largest producer of cassava (cassava) in Indonesia, accounting for around 39% - 47% of the total national production. Producing up to 7.9 million tons per year, this commodity supports more than 70% of the national tapioca industry. Ranked first nationally as the main center of cassava, supplying food needs to raw materials. The total area of cassava plantations in Lampung reaches approximately 366,830 hectares (M Noer Syahriza Ali Km, 2026). The high demand for cassava encourages the development of cassava stalls as a means of distributing agricultural products, especially on the scale of micro and small businesses. The increasing number of cassava stalls requires adequate regulation and supervision so that business activities run in an orderly manner and in accordance with the applicable legal provisions. One of the important aspects in the implementation of the business is the ownership of a business license. Licensing not only functions as the legality of business activities, but also as an instrument of the government in maintaining public order, regulating spatial planning, protecting the environment, and creating healthy business competition (Ayu et al., 2023).

Provisions regarding cassava business governance are regulated in the Lampung Governor's Regulation Number 36 of 2025 concerning Cassava Governance and Downstreaming. In the regulation, Article 17 paragraph (1) has an important position because it is related to the implementation of government functions in carrying out supervision, guidance, and control of the implementation of cassava governance and downstreaming. Cassava downstreaming is the process of transforming cassava from raw materials into high-value-added products (such as tapioca, mocaf, and bioethanol). Cassava management regulates the flow from upstream to downstream to ensure price stability, quality, and farmers' welfare (peraturan gubernur lampung, 2025).

The implementation of this article is an important aspect to be studied because the implementation of regulations in the field often faces various obstacles, such as weak coordination, limited supervision, and there is still a discrepancy between normative provisions and empirical conditions. Cassava stall business actors are required to purchase or receive cassava in accordance with government regulations, especially related to scale standards, business legality, tax compliance, and cassava quality. In this provision, it is emphasized that every business actor is required to have a business license as a form of legal recognition of the business activities carried out. In addition, the government also emphasized the importance of supervision of scales, compliance with tax payments, and the quality of traded cassava crops. The lack of supervision of cassava stalls can cause various problems, such as the establishment of businesses without permits, land use that is not in accordance with the designation, traffic disruptions, environmental pollution due to waste, to the emergence of unfair business competition between business actors (Arrizal et al., 2024). Of the total 89 tapioca factories in Lampung Province, as many as 28 factories or around 31.46% have been registered in SIINas, while 61 factories or around 68.54% have not been registered. This condition shows that there is still low administrative compliance of cassava business actors and the need to strengthen local government supervision. Therefore, licensing supervision needs to be carried out on an ongoing basis by relevant agencies to ensure that each business actor complies with applicable And then there's the T Effective supervision is expected to be able to create an orderly, fair, and sustainable business climate while supporting the improvement of community welfare (Patari, Emmy, 2025).

According to George C. Edwards III, the successful implementation of policies is influenced by communication, resources, the disposition of implementers, and the bureaucratic structure.

However, most agricultural policy implementation research only focuses on the implementation aspect of the program and has not examined in depth the supervisory function of business actors in the agricultural commodity trading chain (Dody Setyawan, Agus Priantono, 2021). Ayu Kartika Putri research shows that the implementation of agricultural policies is more directed at increasing production and fostering farmers, while aspects of supervision of business legality and farmer protection are still limited. This shows that there is a research space regarding the supervision of cassava stalls as part of agricultural commodity governance (Ayukartika et al., 2020). In addition, Prasiwi's research discusses the implementation of micro and small business licensing, but has not linked it to the supervision of scales, commodity quality, and farmer protection in the agricultural sector. Thus, there is still a research gap in the aspect of comprehensive supervision of cassava stall business (Prasiwi et al., 2024). From the perspective of Islamic law, the study by Aprelia and Nurhayati explains that Siyasaḥ Tanfidziyah emphasizes the government's responsibility to carry out and oversee policies for the public good. However, this study has not yet been applied to the implementation of policies regarding cassava governance and downstream processing in Lampung Province.

Previous research has generally addressed the implementation of public policies in the agricultural sector, business licensing, and agricultural governance in general, but there are still some research gaps. First, previous research has examined the implementation of cassava business policies in general and has not specifically discussed the supervision of cassava stalls as part of the agricultural commodity trading system. Second, studies on the implementation of cassava governance policies still focus on aspects of production, downstream, or agricultural policies in general, while aspects of supervision of business legality, weighing scales, taxes, and control of purchasing stalls are still relatively limited. Third, previous research has not much associated the implementation of regional policies with the perspective of Siyasaḥ Tanfidziyah as an approach in assessing the government's responsibility for the implementation of regulations. Fourth, no research has been found that specifically analyzes the implementation of Article 17 paragraph (1) of Lampung Governor Regulation Number 36 of 2025 concerning cassava governance and downstream, especially in the context of supervision of cassava purchase/receipt stalls at the local level. Therefore, this study is here to fill this gap by examining the implementation of local government supervision of cassava stall business actors based on the perspective of Siyasaḥ Tanfidziyah.

According to Grindle, implementation is a general process of administrative actions that can be researched at a specific program level. Horn defines implementation as actions taken by either individuals/officials or government or private groups directed at achieving the goals outlined in the policy. Based on these conditions, supervision of the cassava stall business is important to be studied more deeply. This research is important because various problems related to the legality of the cassava stall business are still found, while supervision from the local government has not been fully optimal. In addition, research on the supervision of cassava stalls is still relatively limited, especially those that focus on *pada implementasi pengawasan pemerintah daerah terhadap usaha lapak ubi kayu* (Prasiwi et al., 2024).

The novelty of this research lies in the focus of the study on the supervision of cassava stall business based on the Governor of Lampung Regulation Number 36 of 2025 concerning Cassava Governance and Downstreaming. Especially in article 17 paragraph (1). This research not only discusses aspects of business legality in general, but also examines the implementation of supervision of licensing, weighing scales, tax compliance, and cassava quality in cassava stall business. Thus, this research is expected to contribute to the development of agricultural business supervision policies and become a reference for local governments in creating orderly, legal, and sustainable cassava business governance.

Method

This study uses a field research method. The field research was carried out to obtain data directly from the research location regarding the implementation of Article 17 Paragraph (1) of Lampung Governor's Regulation Number 36 of 2025 concerning Cassava Governance and Downstreaming in Sinar Rejeki Village, Srimukti Hamlet, Jati Agung District, South Lampung Regency. Sinar Rejeki Village was chosen as the research location because it has characteristics that are relevant to the implementation of cassava business supervision at the field level. This village is located in Jati Agung District, South Lampung Regency, which is an area with active agricultural activities and farmer groups so that it has a relationship with the governance of agricultural commodities, including cassava. This research not only examines the applicable legal provisions, but also examines its application in people's lives and analyzes them based on the perspective of *siyasah tanfidziyah*.

This research is qualitative descriptive, which is research that aims to describe in detail and systematically the facts that occur in the field. In this study, the author describes how to implement Article 17 Paragraph (1) supervision of cassava stalls, as regulated in the Lampung Governor's Regulation Number 36 of 2025. In addition, this study also analyzes the implementation of the policy based on the principles of *siyasah tanfidziyah*.

The data sources used consist of primary data and secondary data. Primary data was obtained directly from the results of interviews with parties related to the research, interviews with three people, namely Mr. Iwan Syamsyuri as the village head, Mr. Mukhtar as a cassava stall business actor, Mr. Sarda as a cassava farmer, and other parties who are considered to know the implementation of the policy. Meanwhile, secondary data was obtained through literature studies in the form of books, journals, theses, laws and regulations, and other official documents relevant to the research.

Data collection was carried out by several techniques, namely interviews, observations, and documentation. Interviews were conducted directly with the resource persons using semi-structured interview guidelines to obtain more in-depth information about the implementation of cassava stall supervision policies. Observation was carried out by directly observing field conditions and cassava stall business activities. Meanwhile, documentation is carried out by collecting various supporting documents, such as village archives, permits, photos of activities, and other data related to research.

Table 1. Live interview data

Num.	Resource Persons	Departments	Role in research
1.	Mr. I S	Village head	As a key informant
2.	Mr. M	Business Actors	As the main informant
3.	Mr. S	The Cassava Farmer	As a supporting informant

In this study, it includes all parties related to the implementation of Article 17 Paragraph (1) of the Lampung Governor's Regulation Number 36 of 2025 in Sinar Rejeki Village, Srimukti Hamlet, Jati Agung District, South Lampung Regency. The sampling technique uses purposive sampling, which is a sample determination technique based on certain considerations according to the needs of the research and the parties who are considered to understand the object of the research, namely; village heads, business actors, and farmers.

The data that has been obtained is then processed through the stage of editing, classification, and compiling data systematically. Furthermore, the data is analyzed using qualitative analysis methods by reducing data, presenting data, and drawing conclusions (Miles dan Huberman, 2014). The results of the analysis are then associated with field findings both theory and applicable regulations, both according to normative law and the principle of *siyasah tanfidziyah* to find out the extent of the implementation of local government policies in the supervision of cassava stalls (Malahati, 2023).

Results and Discussion

Article 17 Paragraph (1) of Lampung Governor Regulation Number 36 of 2025

Article 17 paragraph (1) of the Lampung Governor's Regulation Number 36 of 2025 regulates the obligations of business actors in the governance of cassava purchases from farmers. The implementation of Article 17 paragraph (1) of Governor's Regulation Number 36 of 2025 concerning Cassava Governance and Downstreaming puts local governments as parties that have the obligation to supervise the cassava trading system, especially related to taxes, scales, licensing and cassava quality. These four aspects are important instruments in creating a transparent, fair cassava trading system, and providing protection for farmers and business actors. The government has set a policy but its implementation is still not going well. Lampung Governor Regulation Number 36 of 2025 was issued as an effort by the local government to organize the cassava trading system, increase added value through downstreaming, and protect the welfare of farmers. This regulation is a guideline for farmers, business actors, and local governments in managing the production, distribution, and processing industry of cassava in Lampung Province (Ayu et al., 2023).

peraturan gubernur lampung nomor 36 tahun 2025 pasal 17 ayat (1) tentang tata Kelola dan hilirisasi ubi kayu yaitu "pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait wajib melakukan pengawasan melekat terhadap lapak pembelian/penerimaan ubi kayu di wilayahnya". Mengacu pada peraturan tersebut bahwa pelaku usaha lapak ubi kayu wajib melakukan pembelian atau penerimaan ubi kayu dari petani sesuai dengan ketentuan pemerintah terutama terkait: Timbangan, Perizinan, Pajak, serta Kualitas ubi kayu.

Implementation of Article 17 Paragraph (1) of Lampung Governor's Regulation Number 36 of 2025

The implementation of Article 17 paragraph (1) is also carried out through a supervision system for business actors who buy cassava from farmers. Regency/City governments, as well as related agencies. This team is tasked with ensuring that business actors comply with the provisions in the Governor's Regulation. This supervision includes: (a) the conformity of the purchase price with the reference price, (b) the application of quality discounts (rafaksi); (c) transparency of cassava weighing; (d) licensing administration. The implementation of this policy also involves district/city and village governments. (Governor's Decree, 2025)

Implementation by business actors

implementation of Article 17 paragraph (1) of Lampung Governor Regulation Number 36 of 2025 concerning Cassava Governance and Downstreaming, business actors such as stalls and factories have an important role in the process of purchasing cassava crops from farmers. Implementation in the field is carried out through several stages, ranging from business licensing, harvest receipt, quality determination, weighing, to payment to farmers. Before carrying out business activities, business actors are required to have permits in accordance with the provisions of the local government and applicable laws and regulations.

In practice, business actors buy cassava directly from farmers by considering the quality of the crop. Quality assessment is usually seen from the starch content, cleanliness of the yams, harvest age, and physical condition of cassava in general cassava harvested by farmers with the age of 8-9 months so that the quality of cassava is maximized. The better the quality of cassava, the higher the price given. In addition, business actors also carry out a weighing process to determine the amount of harvest that will be paid to farmers. This weighing should be done using a re-marked weighing device, a re-marked weighing device is done once a year, it takes a long time to re-mark the scale. In order for the results to be accurate and not detrimental to one of the parties, the scale must be checked regularly

to be more transparent. In addition, operational permits, as well as other administrative completeness as a form of business legality. The ownership of permits aims to ensure that cassava trading activities can be supervised by the government and provide legal certainty in the implementation of the business (UU RI, 2013). In addition, licensing is also the basis for the government in coaching and supervising stall business actors.

Implementation in the field still found several problems. There are still three business actors who do not have a complete business license in Sinar Rejeki Village or have not renewed their operational licenses. This condition causes government supervision to be less than optimal and opens up opportunities for violations in cassava trading activities (Susong Hermawan, Budiman Rusli, 2025).

The results of interviews with business actors regarding the supervision of business licenses include:

- a. Supervision of business licenses from the government is not optimal
- b. Checks are rarely done
- c. Lack of awareness of business actors towards regulations
- d. The cost of taking care of permits is expensive.

The results of interviews with cassava stall business actors. Information was obtained that some business actors already have business licenses, but there are still business actors who have not completed the legality of their business. Business actors explained that the process of obtaining permits is considered to take a long time and requires administrative costs, so some business actors delay the processing of business licenses. (informan mukhtar, 2026)

If supervision is carried out regularly and accompanied by guidance from the government, business actors will be more encouraged to run their business in accordance with applicable regulations. Business actors hope that the government will not only provide supervision, but also help facilitate the business process and the downstream of cassava can run in an orderly manner.

Implementation and Role of the Ruler

a. Regulatory Role

Local governments function as regulators that set policies and rules regarding cassava governance. The policy was made to create order in cassava production, distribution, and marketing activities. The government sets quality standards, weighing mechanisms, reference prices, and obligations of business actors in running a cassava processing business. Through this regulatory function, the government seeks to create legal certainty for farmers and business actors so that practices that are detrimental to one of the parties do not occur (Lampung Governor's Regulation, 2024).

b. Supervision or Supervision Role

In addition to making policies, local governments also have the task of supervising the implementation of rules in the field. Supervision is carried out to ensure that companies, stalls, and business actors comply with the provisions that have been stipulated in the governor's regulation. The forms of supervision carried out include: inspection of weighing equipment or weighing impressions, supervision of cassava quality, supervision of payment systems to farmers, monitoring of business licenses, and enforcement of violations of rules. This oversight is important to prevent fraud, such as manipulation of scales, inappropriate price cuts, or trade practices that are detrimental to farmers. With good supervision, the relationship between farmers and companies can run more fairly and transparently.

c. Administrative Role

The government also has an administrative function, namely taking care of various forms of licensing and business administration. In the context of cassava governance, local governments are

authorized to issue industrial business licenses, stall operation permits, and other supporting documents related to cassava trade and processing activities. Licensing aims to ensure that all business activities run in accordance with legal provisions and can be properly supervised by the government. In addition, orderly administration also makes it easier for the government to record business actors, determine policies, and evaluate the development of the cassava downstream sector in the region (Rahman, 2022).

d. The Role of Coaching and Mentoring

The local government also plays a role in providing guidance to farmers and business actors. Coaching is carried out through socialization of regulations, training to improve production quality, agricultural counseling, and assistance in the use of cassava processing technology. Through this coaching, it is hoped that farmers will be able to increase productivity and crop quality so that they can meet industry standards. In addition, the government also encourages the formation of cooperation between farmers and companies in order to create mutually beneficial partnership relationships.

Interview with the head of sinar rejeki village (informan Iwan, 2026). Based on the results of an interview with the Head of Sinar Rejeki Village, Jati Agung District, South Lampung Regency, information was obtained that supervision of the cassava stall business includes:

- a. still not running optimally
- b. Lack of coordination between the village government and related agencies
- c. lack of socialization and coaching.

Supervision that has not been maximized is one of the main factors that hinder the implementation of Article 17 Paragraph (1) of Lampung Governor Regulation Number 36 of 2025 concerning Cassava Governance and Downstreaming. This condition is caused by the large cassava producing area in Lampung Province, the limited number of supervisory officers, and the non-optimal supervision system carried out by related agencies. As a result, not all cassava purchase or receipt stalls can be monitored regularly and thoroughly. The impact of these conditions is that there are still stalls that operate without permits, scales that are not re-marked periodically, and a lack of supervision over the quality of traded cassava. This situation has the potential to cause losses for farmers because transactions become less transparent, both in the weighing process and in determining the selling price of crops. In addition, weak supervision can also reduce the level of compliance of business actors with regulations that have been set by the government.

The lack of coordination between relevant agencies and the village government is also an obstacle in the implementation of cassava stall supervision. The main causes of this condition are the absence of an integrated coordination mechanism, the lack of information exchange regarding business actors' data, and the lack of intensive communication between the village government and related agencies. As a result, supervision of the legality of the business, scales, and quality of cassava cannot be carried out optimally. The impact of the lack of coordination is inaccurate data on business actors, slow handling of violations, and weak supervision in the field. This condition causes there to still be business actors who carry out business activities without official permits and without adequate supervision. In addition, the government's goal of creating an orderly, fair, and transparent cassava trading system is difficult to achieve due to the lack of synergy between institutions that have authority in supervision.

The lack of socialization and coaching to business actors and farmers is also a factor that affects the low effectiveness of policy implementation. This happens because counseling and education activities regarding the importance of business licensing, weighing indicators, and cassava quality standards have not been carried out in an ongoing manner. In addition, limited resources and the lack of coaching programs cause information related to regulations to be not fully understood by the community. The implication of this condition is the low awareness of business actors to complete

the legality of their business and a lack of understanding of the obligations that must be complied with in cassava trading activities. As a result, the level of compliance with regulations is low and there are still many business actors who ignore the applicable regulations. This condition ultimately has an impact on the less effective implementation of the policy, the increased potential for violations, and the emergence of injustice that can harm farmers as parties who should receive protection through the policy. According to the village head, the existence of a business license is very important because it is the basis for legality for business actors in carrying out cassava trading activities. With the permit, the government can collect data, coach, and supervise cassava stall business activities. However, in its implementation, business license supervision is still constrained by the lack of coordination between the village government and related agencies from the local government.

The village head also explained that some business actors do not understand the importance of business legality so they run their business without completing the licensing administration. In addition, supervision from related agencies has not been carried out routinely so that there are still businesses operating without clear administrative supervision. The village head hopes that the local government can increase socialization regarding the importance of business licenses and conduct periodic checks on the legality of cassava stalls in order to create business order and protection for farmers(Intan dkk, 2020).

Obstacles in Implementation Although the government has carried out its various roles, in practice there are still several obstacles in the implementation of the policy, including:

a. Uneven Supervision

Government supervision in some areas is still not optimal. This is due to the lack of coordination of the relevant government and the size of the cassava producing area reaching approximately 366,830 hectares in Lampung Province so that not all stalls or companies can be monitored regularly. As a result, violations such as non-conformity of scales and price non-transparency are still found.

Table 2. Field findings data

No	Location	Field T	Indikasi	DSeems
1.	Cassava stall in Srimukti Hamlet, Sinar Rejeki Village	Unlicensed Outlets Scales are rarely re-checked The difference in cassava quality is not checked	Not all business actors are routinely inspected Supervision of weighing equipment has not been carried out thoroughly Standards are not yet consistent	Not transparent about discounts and prices Potential losses for farmers in transactions Decrease in crop quality standards

b. Weak Enforcement of Violations

In some cases, violations that occur have not received strict sanctions. The weak enforcement causes some business actors to not comply with the applicable rules. Therefore, it is necessary to increase the government's firmness in providing administrative sanctions and legal actions in accordance with applicable regulations.

c. Lack of Public Understanding of Regulations

Some farmers and business actors still do not fully understand the contents of Lampung Governor's Regulation Number 36 of 2025. The lack of socialization has caused the implementation of policies to not run effectively. Therefore, the government needs to increase education and dissemination of information to the public(Yesa Peby Yola, Frenki, 2025).

Apart from being a form of legality, licensing also functions to create order in cassava trading activities. Business actors who have licenses are required to run their businesses according to

applicable regulations, so that practices that are detrimental to farmers can be minimized. For example, the government can supervise pricing, the use of weighing equipment, and the quality of buying and selling transactions between farmers and business actors (Maimun, Hakim, 2024).

Licensing is also an instrument of government control in maintaining the stability of the cassava trading system. With the permit, the local government can collect data on all business actors so that it is easier to carry out guidance, supervision, and enforcement if violations occur. This is important because the cassava sector is one of the strategic commodities in Lampung Province which involves many farmers and industries. The licensing functions in cassava governance include:

a. Ensuring the Legality of the Business

The legality of the business shows that the business actor has been officially recognized by the government. By having a business license, business actors obtain legal certainty in carrying out their business activities. This legality also provides protection for farmers because they conduct transactions with parties whose identities and legal responsibilities are clear.

b. Controlling the Activities of Business Actors

Through the licensing system, the government can control business activities starting from the process of purchasing cassava, determining prices, to distributing production products. This supervision aims to prevent monopolistic practices, price games, or fraud in the transaction process that can harm farmers.

c. Enforcing Operational Standards

Licensing encourages business actors to carry out operational standards in accordance with the provisions. For example, licensing administration, the use of marked weighing equipment, the implementation of a clear payment system, and maintaining the quality of production results. With good operational standards, the relationship between farmers and business actors becomes more fair and transparent (Ayu et al., 2023).

In its implementation, local governments have the responsibility to supervise business actors who have obtained permits. This supervision can be carried out through:

- a. Business license administration check
- b. Regular field surveillance
- c. Checker checks and remarks
- d. Monitoring the purchase price of cassava
- e. Enforcement of business license violations

However, in practice, supervision still faces various obstacles such as limited lack of support facilities, lack of coordination and weak enforcement of sanctions against violations. As a result, there are still business actors who do not comply with the rules.

Previous research has generally addressed the implementation of public policies in the agricultural sector, business licensing, and agricultural governance in general, but there are still some research gaps. (Fahriana Nurrisaa, Dina Herminab, 2025). Therefore, this research is here to fill this gap by examining the implementation of local government supervision of sweet potato stall business actors. First, the previous research examined the implementation of cassava business policies in general and has not specifically discussed supervision of cassava stall business as part of the agricultural commodity trading system. Second, studies on the implementation of cassava governance policies still focus on aspects of production, downstreaming, or agricultural policies in general, while aspects of supervision of business legality, weighing scales, taxes, and control of purchasing stalls are still relatively limited. Third, previous research has not much associated the implementation of regional policies with the perspective of *Siyasah Tanfidziyah* as an approach in assessing the government's responsibility for the implementation of regulations. Fourth, no research has been found that specifically analyzes the implementation of Article 17 paragraph (1) of Lampung Governor Regulation

Number 36 of 2025 concerning cassava governance and downstreaming, especially in the context of supervision of cassava purchase/receipt stalls at the local wood level based on the perspective of Siyasaah Tanfidziyah.

The impact of weak supervision of cassava sellers' stalls for farmers

a. The occurrence of scale fraud

The weak government supervision has caused there to still be cassava stalls that manipulate scales. This condition is detrimental to farmers because the harvest sold is not calculated honestly so that farmers' income is reduced.

b. Unstable Purchase Prices

The lack of supervision of cassava business licenses and trading systems causes business actors to **determine** prices unilaterally. As a result, farmers often receive low prices and do not match the quality of their crops.

c. The Emergence of Illegal Cassava Stalls

Weak regulation has made many stalls operate without official permits. Illegal stalls usually do not follow the applicable business rules so that they have the potential to carry out practices that are detrimental to farmers.

d. No Legal Certainty for Farmers

If there is a dispute in the transaction, it is difficult for farmers to obtain legal protection because the business run by the stall does not have official legality. This makes the position of farmers weak.

e. Declining Farmers' Trust in the Government

The lack of supervision and decisive action from the government can give rise to the assumption that the government has not optimally protected the interests of farmers. As a result, public trust in local governments has decreased.

f. Inhibition of Farmers' Welfare

Losses due to scale fraud, low selling prices, and unclear trading systems have a direct impact on farmers' incomes. If it continues to occur, this condition can reduce the welfare of cassava farmers.

g. The Creation of an Orderly Trading System

Weak supervision causes the cassava trading system to run without clear rules. As a result, business competition becomes unhealthy and commercial activities are difficult to control optimally.

Based on the results of interviews with cassava farmers, it is known that farmers want stricter supervision of cassava stall business licenses. According to farmers, (informan Sarda, 2026). Stalls that have official permits tend to be more orderly in making cassava purchase transactions than stalls that do not have business legality.

Farmers explained that there are still cassava stalls that operate without permits but still buy farmers' crops. This condition raises concerns because government supervision of the scale, price, and transaction quality system has become difficult to do. Farmers consider that weak supervision of business licenses can open up opportunities for fraud that is detrimental to farmers.

In addition, farmers said that the government has not been optimal in regulating businesses that do not have permits. Therefore, farmers hope that the local government can re-collect data on all cassava stalls and provide strict sanctions to business actors who do not have official permits. With good supervision of business licenses, farmers hope to create justice, transparency, and legal protection in cassava trading activities.

Implementation of Siyasaah Tanfidziyeh Perspective supervision

Siyasaah tanfidziyah is a concept in fiqh siyasah that discusses the implementation or execution of government policies by power holders to realize the benefits of society. In this perspective, the

government has an obligation to carry out executive functions, supervision, and ensure that the policies that have been set can be implemented effectively and fairly.

The implementation of Article 17 paragraph (1) of the Lampung Governor's Regulation Number 36 of 2025 has a close relationship with *siyasah tanfidziyah* because the substance of the regulation places the local government as the main implementer in supervising the governance and downstream of cassava, including aspects of licensing, weighing tax, and cassava quality. The supervision carried out by the government is a form of exercising executive authority so that business activities run in accordance with applicable regulations.

Table 3. Data analysis

Yes	Prinsip Siyasah	Ideal Conditions	Field Findings	Compatibility Level
1.	Trust	The government has the obligation to supervise the licensing of cassava quality scales and taxes	It is still found that stalls that operate without a control permit are not routine and inter-agency relationships are still weak	Less suitable
2.	Justice	All business actors must receive the same treatment in supervision and enforcement of rules	Some of the perpetrators have fulfilled the general provisions, but there are still business actors who do not have permits and have not received firm action	Less suitable
3.	Masalah	The supervisory policy aims to protect farmers by creating a cassava trading system that benefits all parties	Weak supervision causes potential losses for farmers due to unclear scales of quality and purchase prices of cassava	Quite appropriate
4.	Hisbah	The government is obliged to carry out active supervision of cassava purchase/receipt stalls	Supervision is not evenly distributed, inspection is rarely carried out and monitoring of scales and quality is not consistent	Less suitable
5.	Tanfidziyah Al-ahkam	Governor's Regulation No. 36 of 2025 must be implemented consistently accompanied by sanctions for violations	Law enforcement and sanctions against violating business actors are still weak and compliance with the rules is not optimal	Less suitable

From the perspective of *siyasah tanfidziyah*, the success of policy implementation is not only measured by the existence of regulations, but also by the effectiveness of implementation in the field. If licensing supervision is not evenly distributed, there are still unlicensed business actors, or weak control over quality and scales, then this shows that the function of *tanfidziyah* is not optimal in carrying out the government's mandate (Aprelia & Nurhayati, 2023). The principles of *siyasah tanfidziyah* include:

a. Trust Principle

The Principle of Trust in Licensing The principle of trust in *Siyasah Tanfidziyah* emphasizes that the government is obliged to carry out its duties and authorities responsibly, especially in the process of granting and supervising business licensing. Licensing is a form of government control over business activities so that they run according to the rules and do not harm the community, especially cassava farmers. Allah SWT. Says (QS. An-Nisa': 58).

وَأَنْ مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْآخِرَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾

Meaning: "Indeed, Allah has commanded you to convey the mandate to its owner. When you establish the law among men, you shall establish it justly. Indeed, Allah has given you the best **teaching**. Indeed, Allah is All-Hearing and All-Seeing". (QS. An-Nisa': 58)

Allah SWT commands every trustee to carry out his duties and responsibilities fairly and professionally. In the context of this research, the local government has the mandate to supervise the purchase or receipt of cassava stalls, including supervision of licensing, weighing marks, cassava quality, and compliance of business actors.

Based on field findings, cassava stalls are still found operating without a complete business license, supervision of scales that are rarely carried out, and suboptimal checks on cassava quality. This condition shows that the mandate given by the regulations to the government has not been implemented optimally. The government should not only issue rules, but also ensure that these rules are implemented consistently in the field. Therefore, uneven supervision practices show that there is a gap between the mandate orders in QS. An-Nisa' verse 58 with the reality of policy implementation in Sinar Rejeki Village.

b. The Principle of Justice (*Al-Adalah*) in Licensing

The principle of justice (*al-adalah*) means that the government must treat all business actors fairly without distinguishing certain parties. Justice means that all business actors are obliged to follow the same rules and receive equal legal treatment. However, what happened in the field was that the government has not routinely supervised cassava stall business actors. Allah SWT. said: (QS. Al-Ma'idah: 8).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَحْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِنِّي أَكْرَهُ لِلْعَاقِبَةِ لِأَنَّهَا أَلَمَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Meaning: "O you who have believed, be the enforcers (of the truth) for the sake of Allah (and the witnesses (who act) justly. Do not let your hatred of a people drive you to act unjustly. Be fair because it is closer to piety. Fear Allah. Indeed, Allah is Thorough in what you do." (QS. Al-Ma'idah: 8).

Based on field findings, the aspect of licensing supervision, re-marking cassava quality scales is still a **challenge** because not all stalls or cassava business actors have been supervised as a whole in accordance with applicable regulations. This condition shows an imbalance in the implementation of supervision, because business actors who have met the administrative requirements and checks of the scales are in a different position from business actors who are not supervised by the relevant government. Weak supervision will have an impact, among others: (1) Unlicensed business actors create injustice for business actors who have complied with the rules; (2) Weak law enforcement shows that the application of the principle of justice is not optimal. From the perspective of *siyasah tanfidziyah*, this condition reflects the suboptimal implementation of administrative justice because the government has not fully ensured that all business actors are subject to the same legal obligations. (Irwansyah & Setiawan, 2023).

c. Principle of Maslahah (Public Welfare)

The principle of *maslahah* in Islamic economics emphasizes that every economic policy and **activity** must provide benefits, welfare, and protection for the wider community. All rules made by the government must aim to create the common good, not just benefit certain groups. In the context of business licensing, legality should be a tool to maintain economic balance, protect small communities, and prevent social and environmental losses. Allah SWT said (QS. Al-Ma'idah: 2).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْثِلَ النَّبِيِّ الْحَرَامَ يَنْتَفِعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَايُ قَوْمٍ أَنْ صَدَّقْتُمْ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدَاوَةِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Meaning: "O you who have believed, do not violate the sharia (holiness) of Allah, do not (violate the honour) of the haram months, do not (disturb) the hadyu (sacrificial animals) and qalā'id (the marked sacrificial animals), and do not (disturb) the visitors of Jerusalem while they are seeking the bounty and pleasure of their Lord! When you have done tahalul (completing ihram), hunt (if you want). Do not hate a people, for they hinder you from the Haram Mosque, pushing you to go beyond the limits. Help yourselves in righteousness and piety, and do not help each other in sin and enmity. Fear Allah, for Allah is very severe in His punishment". (QS. Al-Ma'idah: 2).

The verse explains that every policy must be directed at the creation of benefits and welfare of the community. The government, business actors, and the community must work together to create fair and beneficial economic activities. However, the results of the study show that weak supervision causes the potential for scale manipulation, price intransparency, and the operation of stalls without permits. As a result, farmers have the potential to suffer economic losses and not get optimal protection. This condition shows that the benefit goals that are the basis of the policy have not been fully achieved because the expected benefits have not been felt optimally by farmers as the main group that must be protected. (Rosyidi, 2024).

The principle of *maslahah* teaches that the main goal of policy is to provide the greatest benefit to society. Therefore, business licenses should not only be used as an administrative formality, but must be really able to protect the community from the negative impact of business activities. If supervision of business licenses is weak, then various violations can occur, such as land abuse, resource exploitation, and injustice to farmers and small communities (Nurhayati & Surya, 2023).

d. Principle of *Hisbah* (Supervision)

Hisbah is a principle of supervision in Islam that aims to maintain order, honesty, and justice in economic and social life. In Islamic economics, supervision has an important role so that all business activities run in accordance with the sharia and applicable legal rules. Supervision is carried out to prevent irregularities and protect the rights of the community. Allah SWT says (QS. Ali 'Imran: 104).

وَلْيَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Meaning: "And there should be among you a group of people who call for virtue, enjoin the righteous and prevent from doing evil." (QS. Ali 'Imran: 104).

This verse is the basis for the importance of supervision in Islam. Supervision is carried out so that every activity remains on the right path and does not cause damage to the community. The *Hisbah* principle emphasizes that the government or authorities have a great responsibility in supervising the implementation of business licenses. Weak supervision will open up opportunities for violations of the law, abuse of permits, and various forms of fraud that harm the community. The absence of strict control can cause violations to continue to recur because business actors feel unsupervised and are not afraid of sanctions. As a result, economic order has been disrupted and public trust in the government has decreased.

Based on field findings, supervision has not been carried out regularly and thoroughly. The inspection of business licenses, scale stamps, and cassava quality is still limited, opening up opportunities for violations. This practice shows that the function of *hisbah* has not been running optimally. In fact, according to QS. Ali Imran paragraph 104, the government is obliged to actively supervise to prevent irregularities that can harm the community, especially cassava farmers. Therefore,

supervision must be carried out actively, consistently, and transparently. In Islam, supervision is not only aimed at finding faults, but also as a form of responsibility to maintain justice and mutual benefit. With good supervision, business activities can run in a healthy, orderly manner, and provide benefits to the entire community.

e. Principles of Tanfidz al-Ahkam (Implementation of Law)

The principle of tanfidz al-ahkam emphasizes that the law must be implemented in a real and consistent manner, not just a written rule without application. In Islamic economics, law enforcement is essential to create justice, legal certainty, and order in society. (Maimun dan Hakim 2023). All parties are obliged to comply with the rules that have been set in order to maintain balance. Allah SWT says (QS. An-Nisa': 135)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَمَّذُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Meaning: "O you who have believed, be the enforcer of justice and a witness for Allah's sake, even if the testimony is incriminating to yourself, your parents, or your relatives. If he is rich or poor, Allah is more worthy of knowing both. Therefore, do not follow your desires because you want to deviate (from the truth). If you distort (words) or turn away (refuse to be witnesses), verily Allah is Thorough in all that you do." (QS. An-Nisa': 135)

This verse shows that justice must be upheld earnestly without discriminating between one's position. The principle of tanfidz al-ahkam teaches that a rule will not provide benefits if it is not applied in real terms. In the implementation of business licenses, the law must be strictly enforced to all parties who commit violations. If the law is only used as an administrative formality without clear supervision and sanctions, then violations will continue to occur. Weak law enforcement can lead to injustice and a decrease in public trust in the government. Therefore, strict sanctions are needed so that business actors comply with applicable rules and do not commit irregularities. Consistent implementation of the law also shows the government's responsibility in maintaining economic order. With fair and firm law enforcement, the community will feel protected and economic activities can run in a more orderly manner and in accordance with the principles of Islamic law.

Conclusion

Based on the results of the research, it can be concluded that the implementation of Article 17 Paragraph (1) of Lampung Governor's Regulation Number 36 of 2025 concerning Cassava Governance and Downstreaming in Sinar Rejeki Village, Jati Agung District, South Lampung Regency, has not been running optimally. The local government has carried out the function of supervising cassava purchase/receiving stalls through supervision of licensing, weighing marks, cassava quality, and taxes. However, in practice, a number of problems are still found, such as stalls that do not have complete business licenses, supervision of scales that have not been carried out regularly, lack of transparency in transactions, and weak coordination between related agencies. This condition shows that the purpose of supervision as mandated in Article 17 Paragraph (1) has not been fully achieved.

Factors that hinder the implementation of this policy include limited field supervision, lack of socialization to business actors and farmers, low awareness of business actors on the importance of business legality, and suboptimal enforcement of sanctions for violations. As a result, there are still practices that have the potential to harm farmers, such as unclear weighing systems, price instability, and the operation of stalls without official permits.

Viewed from the perspective of *Siyasah Tanfidziyah*, the implementation of Article 17 Paragraph (1) has not fully reflected the principles of trust, justice, *maslahah*, *hisbah*, and *tanfidz* al-ahkam. The government as a trustee has the responsibility to ensure that all business actors comply with applicable provisions and provide fair protection to farmers. Therefore, it is necessary to increase more consistent supervision, strengthen coordination between agencies, continuous socialization, and firm law enforcement so that cassava governance and downstream can run effectively, fairly, and be able to realize the benefits and welfare of the community, especially cassava farmers.

References

- Aminah Sunardiyo Putri, B. H. W. (2022). Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian The Implementation Of Sustainable Food. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(4), 323–330. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Aprilia, R., & Nurhayati, A. (2023). Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera : Analysis of Fiqh *Siyāsah Tanfidziyah*. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 3(2). <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.21222%0AImplementation>
- Arrizal, B. H., Ramadhan, R. P., & Fahrurrizkianur, A. (2024). Analisis Pentingnya Legalitas Usaha (Daftar Izin Usaha) Bagi Perusahaan. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 298–308. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>
- Ayu, K., Putri, K., & Rahmi, A. (2023). Implementasi kebijakan penguatan fungsi penyuluhan pertanian. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 453–462. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Dody Setyawan1, Agus Priantono NC2, F. F. (2021). Model George Edward Iii : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. *Jurnal Politik, Sosial & Kebijakan Publik (Publicio)*, 3(2), 9–19.
- Fahriana Nurrisaa, Dina Herminab, N. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , dan Analisis Data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 02(03), 793–800. <https://jurnal.koposindo.com/index.php/jtpp/index> E-ISSN
- Indriati Agustina Gultom1, Ayu Kartika Puspaa2, Yanuaris Yanu Dharmawan3, A. S. U. (2020). Analisis Perencanaan Sektor Pertanian Berbasis Korporasi. *Jurnal Visionist*, 9(September).
- Intan dkk. (2020). Analisis Yuridis Efektivitas Pengawasan oleh Pemerintah terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan. *Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, 3(4), 1–8.
- M Noer Syahriza Ali Km. (2026). Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Menjaga Kestabilan Harga Singkong Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani. *Journal of Law and Social Change Review*, 1(1), 1–10. <https://jurnal.sshpublikasi.com>
- Maimun, Hakim. (2024). *Siyāsah Syar'iyah* and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 3(1). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710%0ASiyasah>
- Malahati, F. (2023). Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348.
- Miles dan Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications, Inc. 2455 Teller Road Thousand Oaks, California 91320.
- Nurhayati, A., & Surya, D. (2023). Halal Certification for Micro and Small Businesses in Bandar Lampung , Indonesia : An Evaluation from the *Maslahah* Perspective. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 3(1). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>
- Patari, Emmy, P. N. (2025). Tantangan dan Solusi Dalam Pengawasan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Manajemen Sumber Daya Manusia dalam. *Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(2), 198–204.
- peraturan gubernur lampung. (2024). *Petani Mengingat : Undang-Undang Nomor 8 tahun 2024*.
- peraturan gubernur lampung. (2025). *tata-kelola-dan-hilirisasi-ubi-kayu.pdf*. bandar lampung 31-10-2025.
- Prasiwi, S. D., Mursyidah, L., & Sutanto, S. H. (2024). Volume 18 Nomor 1 Juni 2024 Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi Usaha Mikro dan Kecil Topi di Desa Punggul , Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal*

- Utbang Kebijakan, 18(666), 59–73. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v18i1.629>*
- Rahman, A. (2022). Agricultural Transformation in Indonesia : Evaluation of Policy Implementation and Challenges Faced. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik, 12(2)*, 691–700. homepage: <http://ojs.unm.ac.id/iap%0AAgricultural>
- Susong Hermawan , Budiman Rusli, D. c abc. (2025). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik di Sektor Pertanian: Suatu Tinjauan Literatur. 10(2)*, 187–199.
- UU RI. (2013). *Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dengan Presiden Republik Indonesia.. 3*.
- Yesa Peby Yola, Frenki, N. R. (2025). *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, 14(3)*, 409–420. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Bapak
Iwan Samsyuri Selaku Kepala
Desa Sinar Rejeki



Wawancara Bersama Bapak
Mukhtar Selaku Pelaku Usaha
Lapak Ubi Kayu



Wawancara Bersama Bapak
Sarda selaku Petani Ubi Kayu



Wawancara dengan kepala
disperindang lampung selatan

Biografi Penulis



Nama Lengkap Penulis Agung Romadon Lahir Di Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Pada Tanggal 8 Desember 2000, Anak Pertama Dari Pasangan Bapak Legiyono Dan Ibu Masnah.

Pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 purwotani dan lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Satap satu purwotani hingga lulus pada tahun 2018, serta menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 01 Jati Agung lulus pada tahun 2021, dan melanjutkan Studi Tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung di mulai pada semester 1 tahun akademik 2022/2023.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H/2026 M**

